

### BAB III

#### PEMBAHASAN

Pada bab ini, berita yang dimuat dalam sajian data penelitian merupakan beberapa berita yang telah dipilih oleh penulis pada saat pemberitaan seputar konflik penolakan pembangunan NYIA yang kembali mencuat di akhir tahun 2017 melalui surat kabar harian Tribun Jogja dan Kedaulatan Rakyat. Pemberitaan mengenai pembangunan NYIA tersebut mengandung sudut pandang yang berbeda. Analisis *framing* yang akan dilakukan bertujuan untuk melihat bagaimana realitas yang didapatkan khalayak dari hasil rangkaian pemberitaan dalam pemilihan bahasa juga penentuan peristiwa seperti apa yang diberitakan oleh wartawan dan medianya. Terdapat 14 berita yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini, yakni Tribun Jogja sebanyak 9 berita dan Kedaulatan Rakyat sebanyak 5 berita.

**Tabel 3.1**

**Judul Berita Edisi 03 Desember 2017**

No.	Tribun Jogja	Kedaulatan Rakyat
1	Hermato Merasa Hidup di Kota Mati	MENGACU PERPRES DAN SURAT PEMERINTAH KEJATI DIY Senin, Angkasa Pura Kosongkan Lahan
2	Senin Besok AP I Tempuh Langkah Serius	-

**Sumber: Olahan Peneliti**

**Tabel 3.2**

**Judul Berita Edisi 04 Desember 2017**

<b>No.</b>	<b>Tribun Jogja</b>	<b>Kedaulatan Rakyat</b>
1	Pemkab Siapkan Rusunawa Triharjo	SOAL PENGOSONGAN BANDARA Sultan: “Mosok Kudu Dipeksa”

**Sumber: Olahan Peneliti**

**Tabel 3.3**

**Judul Berita Edisi 05 Desember 2017**

<b>No.</b>	<b>Tribun Jogja</b>	<b>Kedaulatan Rakyat</b>
1	Saya Akan Bertahan Sampai Akhir Hayat	ADA AKSI MENOLAK BANDARA Tak Ganggu Pembersihan Lahan

**Sumber: Olahan Peneliti**

**Tabel 3.4**

**Judul Berita Edisi 06 Desember 2017**

<b>No.</b>	<b>Tribun Jogja</b>	<b>Kedaulatan Rakyat</b>
1	Saya Dicekik, Diseret dan Ditendang	PETUGAS AMANKAN PENDATANG Ratakan Tanaman Sekitar Rumah Berpenghuni
2	Polisi Akhirnya Bebaskan 15 Aktivis	-

**Sumber: Olahan Peneliti**

**Tabel 3.5**

**Judul Berita Edisi 07 Desember 2017**

<b>No.</b>	<b>Tribun Jogja</b>	<b>Kedaulatan Rakyat</b>
1	AP I Berharap Warga Ikhlas	Pascapembersihan Lahan Polres Lepas 15 Aktivis

**Sumber: Olahan Peneliti**

**Tabel 3.6**

**Judul Berita Edisi 08 Desember 2017**

<b>No.</b>	<b>Tribun Jogja</b>	<b>Kedaulatan Rakyat</b>
1	Warga Diminta Jangan Persulit Situasi	-

**Sumber: Olahan Peneliti**

**Tabel 3.7**

**Judul Berita Edisi 09 Desember 2017**

<b>No.</b>	<b>Tribun Jogja</b>	<b>Kedaulatan Rakyat</b>
1	35 Warga Tolak Surat Konsinyasi	-

**Sumber: Olahan Peneliti**

## A. Bingkai Pemberitaan Surat Kabar Harian Tribun Jogja

### 1. *Frame*: Penolakan Warga Kulon Progo terhadap Pembangunan NYIA

#### STRUKTUR SINTAKSIS

No.	Terbit	Headline
1	03 Desember 2017	Hermato Merasa Hidup di Kota Mati
2	05 Desember 2017	Saya Akan Bertahan Sampai Akhir Hayat
3	06 Desember 2017	Saya Dicekik, Diseret dan Ditendang
4	09 Desember 2017	35 Warga Tolak Surat Konsinyasi
<i>Lead</i>		
1	03 Desember 2017	Derasnya hujan yang mengguyur menemani Tribun Jogja menuju lokasi pemukiman yang hendak dijadikan mega proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA), Senin (27/11) malam. Sesampainya di lokasi lahan mega proyek tersebut yang terlihat tak lebih dari sebuah kota mati.
2	05 Desember 2017	Ponirah (35) dan Guntoro suaminya, memilih masuk ke dalam rumahnya saat sekitar lima <i>backhoe</i> milik PT AP I mulai bergerak merobohkan rumah milik warga yang sudah tak berpenghuni. Ponirah adalah satu dari sejumlah warga yang bersikukuh menolak melepaskan rumahnya untuk proyek bandara New Yogyakarta Internatinal Airport (NYIA).
3	06 Desember 2017	Pekik takbir menggema saat dua unit <i>backhoe</i> menderap ke halaman rumah Fajar Rahmadi, Selasa (5/12) siang, seorang warga Dusun Kragon

		II, Palihan, Temon, Kulon Progo yang masih menempati lahan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Ketegangan tak bisa dihindarkan di hari kedua pengosongan lahan bandara ini.
4	09 Desember 2017	Niatan PT Angkasa Pura I untuk mempercepat pengosongan lahan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, kembali tak bergayung sambut.
<b>Latar Informasi</b>		
1	03 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisa dikatakan 90 persen lokasi lahan bandara yang teletak di Pedukuhan Kragon II, Desa Palihan, Temon Kulon Progo gelap gulita.</li> <li>• Hermanto hanyalah satu dari sekitar 40 anggota Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) yang masih bersikukuh mempertahankan setiap jengkal tanahnya dari gilasan mega proyek NYIA.</li> </ul>
2	05 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasangan suami istri ini tak bergeming ketika suara <i>backhoe</i> merobohkan sebuah rumah yang posisinya hampir berdempetan dengan rumah mereka. Tak lama berselang, satu persatu bagian rumah tetangga Ponirah yang hanya berjarak sekitar setengah meter mulai berjatuh di tanah terkena hantaman <i>backhoe</i>.</li> </ul>
3	06 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diceritakan Fajar, saat itu</li> </ul>

		<p>pihaknya dipepet dan dipancing aparat untuk melakukan tindakan anarkis. Sampai kemudian terjadi dorong mendorong antara kubu Fajar yang pasang pagar betis dengan aparat yang memaksa membubarkan barisan.</p>
4	09 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendistribusian surat penetapan konsinyasi bereserta SP 1 pengosongan lahan tahap kedua itu sedianya dilakukan untuk dua desa, yakni Palihan, ada 47 surat yang diterima pemilik lahan maupun ahli warisnya sedangkan enam surat mendapat penolakan. Di Glagah, ada 46 warga yang mau menerima surat tersebut dan 29 warga menolak menerimanya.</li> <li>• <i>Project Secretary</i> Pembangunan NYIA PT AP I, Didik Tjatur, Jumat (8/12) mengatakan, pada saat itu pihaknya hendak menyampaikan surat penerapan konsinyasi dana ganti rugi pembebasan lahan dari Pengadilan Negeri (PN) Wates, disertai surat peringatan pertama (SP 1) pengosongan lahan dari AP I. Namun, tim ditolak warga yang tak mau menerima surat tersebut.</li> <li>• Mereka tak lain warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP). Selain itu tim dihadang sekelompok</li> </ul>

		orang mengatasnamakan simpatisan warga penolak bandara. Tim dari AP I yang didampingi pihak PN, kepolisian, dan TNI itu memilih balik arah dan tak melanjutkan kegiatannya.
<b>Kutipan, Sumber, Pernyataan</b>		
1	03 Desember 2017	Hermanto (warga Pedukuhan Kragon II Desa Palihan, Temon, Kulon Progo)  “Sebagai warga negara saya sangat menyesal kenapa tidak ada pemberitahuan keputusan listrik. Ini kan proyeknya AP I, kenapa mereka tidak izin kepada kami kalau mau memutus listrik. Kami ini pelanggan.”
2	05 Desember 2017	Ponirah dan Guntoro (pasangan suami – istri warga Glagah, Temon, Kulon Progo)  “Apapun yang terjadi, kami akan tetap mempertahankan rumah dan lahan kami.”
3	06 Desember 2017	Hermanto (warga Pedukuhan Kragon II Desa Palihan, Temon, Kulon Progo)  “Saya tidak tahu itu kayu atau batu. Benda lemparan itu datang dari arah barisan aparat yang berjaga. Mengenai tepat pelipis saya dan langsung deras mengucur darah.”
4	09 Desember 2017	Didik Tjatur ( <i>Project Secretary</i> Pembangunan NYIA PT AP I)

		“Kami hanya menjalankan tugas dari pemerintah. Surat itu akan kami sampaikan lagi Senin (11/12).”
<b>Penutup</b>		
1	03 Desember 2017	“Sampai kapan kita nggak akan tahu. Seperti kita hidup, tak akan pernah tahu kapan kita mati,” selorohnya.
2	05 Desember 2017	Sama dengan warga yang lain, Fajar juga mengungsikan anaknya yang duduk di bangku kelas X SMA dan kelas I SD. Apalagi anaknya yang di SMA sedang menempuh ujian. Namun ia menyebutkan, kedua anaknya tersebut sempat menolak diungsikan dan akan bersama orangtuanya ikut mempertahankan rumahnya.
3	06 Desember 2017	“Mereka yang masih mahasiswa akan kami Tanya ke universitasnya, apa benar ini mahasiswanya. Karena berdasar laporan intel pihak kampus tidak pernah mengeluarkan izin seperti ini. Ini ilegal,” jelasnya.
4	09 Desember 2017	“Pembangunan NYIA telah ditetapkan oleh Keputusan Presiden dan perlu didukung demi kepentingan negara dan masyarakat yang lebih luas. Mohon kerelaan dan kesediaan warga segera mengambil uangnya di PN Wates,” kata dia.

Pada tabel di atas terdapat struktur sintaksis dari empat pemberitaan dalam surat kabar harian Tribun Jogja dengan bingkai pemberitaan yang sama. Struktur sintaksis merupakan perangkat penelitian *framing* pertama

dengan unit analisis meliputi *headline*, *lead*, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, dan penutup yang terdapat dalam sebuah berita. Keempat pemberitaan yang ditampilkan oleh Tribun Jogja ini memperlihatkan bingkai yang mendeskripsikan beberapa bentuk penolakan warga Kulon Progo terhadap pembangunan NYIA. Seperti yang terdapat pada pemberitaan pertama dengan *headline* “Hermato Merasa Hidup di Kota Mati”, kemudian yang kedua dengan *headline* “Saya Akan Bertahan Sampai Akhir Hayat”, “Saya Dicekik, Diseret, dan Ditendang”, dan yang terakhir “35 Warga Tolak Surat Konsinyasi”.

Adanya konflik yang terjadi antara warga dengan pihak berwenang dapat dilihat secara jelas pada judul *headline* pemberitaan Tribun Jogja tanggal 03, 05, 06, dan 09 Desember 2017 dimana menjelaskan bahwa warga menolak atas pembangunan yang sedang berlangsung tersebut.

Selanjutnya pada bagian *lead* yang dapat dikatakan sebagai gambaran pembahasan dalam sebuah berita. Berikut *lead* pemberitaan pada tanggal 03 Desember 2017:

**Derasnya hujan yang mengguyur menemani Tribun Jogja menuju lokasi pemukiman yang hendak dijadikan mega proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA), Senin (27/11) malam. Sesampainya di lokasi lahan mega proyek tersebut yang terlihat tak lebih dari sebuah kota mati. (03 Desember 2017)**

*Lead* di atas yang telah dipilih oleh Tribun Jogja dalam memberitakan peristiwa mega proyek NYIA ingin memberikan pandangan kepada pembaca bahwa keputusan aliran listrik yang dilakukan secara sepihak

oleh PT AP I mengakibatkan beberapa warga yang masih menetap di daerah tersebut seperti tinggal di sebuah kota mati. Penggunaan kata “terlihat” pada *lead* seakan berlebihan sehingga dapat membuat pembaca berasumsi yang berlebihan juga. Selanjutnya pada *lead* pemberitaan pada tanggal 05 Desember 2017 yaitu:

**Ponirah (35) dan Guntoro suaminya, memilih masuk ke dalam rumahnya saat sekitar lima *backhoe* milik PT AP I mulai bergerak merobohkan rumah milik warga yang sudah tak berpenghuni. Ponirah adalah satu dari sejumlah warga yang bersikukuh menolak melepaskan rumahnya untuk proyek bandara New Yogyakarta Internatinal Airport (NYIA). (05 Desember 2017)**

*Lead* di atas menjelaskan mengenai salah satu warga yang menolak adanya pembangunan bandara NYIA. Dapat dilihat bahwa dari *headline* pemberitaan sudah menggambarkan bagaimana salah satu warga tersebut mencoba bertahan saat pihak AP I mulai melakukan tugasnya.

Pada *lead* pemberitaan yang ketiga, berkaitan dengan pemberitaan pada tanggal 05 Desember 2017 saat pihak AP I bertugas meratakan bangunan yang tidak berpenghuni. Selain Ponirah, salah satu warga yang bertahan di rumahnya, ada warga lain yang juga sedang mempertahankan tempat tinggalnya, seperti yang terdapat pada *lead* berikut:

**Pekik takbir menggema saat dua unit *backhoe* menderap ke halaman rumah Fajar Rahmadi, Selasa (5/12) siang, seorang warga Dusun Kragon II, Palihan, Temon, Kulon Progo yang masih menempati lahan New Yogyakarta International Airport (NYIA). Ketegangan tak bisa dihindarkan di hari kedua pengosongan lahan bandara ini. (06 Desember 2017)**

Kemudian *lead* berita edisi 09 Desember 2017 di bawah ini mengarah pada kelanjutan dua berita sebelumnya. Lebih lanjut, kali ini pihak AP I ditolak kedatangannya saat ingin mendatangi kediaman warga untuk memberikan surat penetapan konsinyasi dan surat peringatan pengosongan lahan dan bangunan. Namun kegiatan tersebut masih tetap mendapat penolakan dari warga yang masih menempati rumah mereka di atas lahan calon bandara. Surat penetapan konsinyasi beserta SP 1 pengosongan lahan tahap kedua tersebut dilakukan untuk dua desa, yaitu Desa Palihan sebanyak 47 surat yang diterima pemilik lahan maupun ahli warisnya sedangkan enam surat mendapat penolakan. Sedangkan di Desa Glagah ada 46 warga yang mau menerima surat tersebut dan 29 warga menolak menerimanya.

**Niatan PT Angkasa Pura I untuk mempercepat pengosongan lahan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, kembali tak bergayung sambut. Warga terdampak yang masih mendiami rumah-rumah di dalam lahan bandara menolak menerima surat penetapan konsinyasi maupun surat peringatan pengosongan lahan dan bangunannya. Hal ini terjadi ketika PT AP I hendak melayangkan surat tersebut, Kamis (7/12). (09 Desember 2017)**

Berikutnya latar informasi, yaitu sebuah gambaran lanjutan pemberitaan yang digunakan oleh wartawan dalam membentuk bingkai pada sebuah berita. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian *lead*, pemberitaan tanggal 03 Desember 2017 yaitu mengenai pemutusan aliran listrik secara sepihak oleh AP I. Mereka masih bersikukuh untuk tinggal di

rumah masing-masing dimana tempat tinggal mereka sudah termasuk dalam area lahan mega proyek NYIA. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Hermanto sebagai salah satu warga yang memberikan keterangan dan masih bersikukuh untuk tetap tinggal di “kota mati” tersebut.

**Bisa dikatakan 90 persen lokasi lahan bandara yang teletak di Pedukuhan Kragon II, Desa Palihan, Temon Kulon Progo gelap gulita. (03 Desember 2017)**

**Hermanto hanyalah satu dari sekitar 40 anggota Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) yang masih bersikukuh mempertahankan setiap jengkal tanahnya dari gilasan mega proyek NYIA. (03 Desember 2017)**

Beralih pada berita selanjutnya, latar informasi edisi 05 dan 06 Desember 2017 saling berkaitan. Pemberitaan pada tanggal tersebut berisi tentang kegiatan AP I yang mulai menjalankan tugas dalam meratakan beberapa tanaman dan bangunan yang telah ditinggalkan oleh warga. Kemudian dalam pemberitaan yang dikemas, menceritakan langsung dari sudut pandang warga yang mengalami dan berada di posisi tersebut seperti pada kutipan kalimat berikut:

**Pasangan suami istri ini tak bergeming ketika suara *backhoe* merobohkan sebuah rumah yang posisinya hampir berdempetan dengan rumah mereka. Tak lama berselang, satu persatu bagian rumah tetangga Ponirah yang hanya berjarak sekitar setengah meter mulai berjatuh di tanah terkena hantaman *backhoe*. (05 Desember 2017)**

**Diceritakan Fajar, saat itu pihaknya dipepet dan dipancing aparat untuk melakukan tindakan anarkis. Sampai kemudian terjadi dorong mendorong antara kubu Fajar yang pasang pagar betis dengan aparat yang memaksa membubarkan barisan. (06 Desember 2017)**

Namun terdapat perbedaan latar kejadian dimana pada tanggal 06 Desember 2017 terjadi bentrok antara warga dengan pihak berwenang. Beberapa warga diceritakan telah melakukan pertahanan dan merasa dipancing aparat untuk bertindak anarkis. Berbeda dengan pemberitaan sebelumnya yang menggambarkan bahwa bentuk pertahanannya yaitu berupa bertahan di tempat tinggal tanpa bentuk perlawanan yang berlebihan.

Selanjutnya latar informasi pada berita tanggal 09 Desember 2017 menjelaskan tentang warga yang melakukan penolakan surat penetapan konsinyasi dan SP I pengosongan lahan. Ternyata sebagian besar yang menolak surat tersebut merupakan warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP), seperti yang dapat kita lihat dalam kalimat berikut:

***Project Secretary* Pembangunan NYIA PT AP I, Didik Tjatur, Jumat (8/12) mengatakan, pada saat itu pihaknya hendak menyampaikan surat penerapan konsinyasi dana ganti rugi pembebasan lahan dari Pengadilan Negeri (PN) Wates, disertai surat peringatan pertama (SP 1) pengosongan lahan dari AP I. Namun, tim ditolak warga yang tak mau menerima surat tersebut. (09 Desember 2017)**

**Mereka tak lain warga yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP). Selain itu tim dihadap sekelompok orang mengatasnamakan simpatisan warga penolak bandara. Tim dari AP I yang didampingi pihak PN, kepolisian, dan TNI itu memilih balik arah dan tak melanjutkan kegiatannya. (09 Desember 2017)**

Didik Tjatur selaku *Project Secretary* Pembangunan NYIA PT AP I juga mengatakan bahwa peringatan yang diberikan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya warga tetap perlu memahami bahwa setelah adanya penetapan putusan konsinyasi dari pengadilan, maka hak kuasa atas tanah mereka akan beralih menjadi milik negara.

Selanjutnya adalah pernyataan, sumber, dan kutipan. Pernyataan, sumber, dan kutipan tersebut berfungsi sebagai penguat bingkai dalam suatu pemberitaan. Secara tidak langsung, ketiga hal tersebut digunakan untuk mendeskripsikan pihak mana saja yang ditonjolkan dalam pemberitaan tersebut. Pada *frame* pemberitaan tanggal 03 Desember 2017, Hermanto, Fajar Rahmadi, dan Barun sebagai warga Pedukuhan Kragon II Desa Palihan, Temon, Kulon Progo memperlihatkan bahwa adanya ketidakberpihakan warga atas pembangunan bandara NYIA. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya fakta yang ditulis wartawan bahwa AP I tidak memberikan informasi mengenai adanya pemutusan aliran listrik yang akan terjadi di daerah IPL yang mana daerah tersebut masih ditempati oleh mereka dan sebagian warga lainnya. Terdapat pernyataan Hermanto sebagai narasumber seperti berikut:

**Hermanto (warga Pedukuhan Kragon II Desa Palihan, Temon, Kulon Progo) “Sebagai warga negara saya sangat menyesal kenapa tidak ada pemberitahuan pemutusan listrik. Ini kan proyeknya AP I, kenapa mereka tidak izin kepada kami kalau mau memutus listrik. Kami ini pelanggan.” (03 Desember 2017)**

Sebelumnya, pada edisi 03, 05, dan 06 Desember 2017 menggunakan narasumber yang sama yaitu warga yang terlibat dan secara langsung berada di lokasi kejadian. Berikut ini pernyataan Ponirah pada tanggal 05 Desember 2017 saat ia dan suaminya tetap bertahan di dalam rumah ketika alat berat mulai meratakan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya:

**Ponirah dan Guntoro (pasangan suami – istri warga Glagah, Temon, Kulon Progo) “Apapun yang terjadi, kami akan tetap mempertahankan rumah dan lahan kami.” (05 Desember 2017)**

Pemberitaan selanjutnya yaitu berasal dari Hermanto yang sebelumnya juga menjadi narasumber yang sama pada pemberitaan “seperti hidup di kota mati”. Pada pemberitaan dalam empat edisi ini, penulis merasa para pembaca diajak untuk satu pemikiran bahwa hak-hak warga mulai tidak bisa lagi di toleransi. Seperti kesaksian yang dikatakan Hermanto yang menjadi korban pada saat terjadinya bentrok pada pemberitaan tanggal 06 Desember 2017 antara pihak berwenang dan warga yang tak terhindarkan:

**Hermanto (warga Pedukuhan Kragon II Desa Palihan, Temon, Kulon Progo) “Saya tidak tahu itu kayu atau batu. Benda lemparan itu datang dari arah barisan aparat yang berjaga. Mengenai tepat pelipis saya dan langsung deras mengucur darah.” (06 Desember 2017)**

Selanjutnya dalam pemberitaan tanggal 09 Desember 2017 pernyataan yang disampaikan oleh *Project Secretary* Pembangunan NYIA PT AP I, Didik Tjatur bahwa mereka akan melanjutkan tugas yang diberikan pemerintah dalam upaya penyampaian surat tersebut pada hari berikutnya

dengan harapan warga sudah bisa lebih menerima adanya pembangunan bandara ini.

**Didik Tjatur (*Project Secretary* Pembangunan NYIA PT AP I)  
“Kami hanya menjalankan tugas dari pemerintah. Surat itu akan kami sampaikan lagi Senin (11/12).” (09 Desember 2017)**

Pada bagian penutup, berita edisi 03 Desember 2017 dikemas dengan kalimat yang diungkapkan oleh Fajar. Ia merupakan salah satu warga yang juga masih tinggal di rumahnya yang berada di atas lahan calon pembangunan bandara NYIA.

**“Sampai kapan kita nggak akan tahu. Seperti kita hidup, tak akan pernah tahu kapan kita mati,” seloroh nya. (03 Desember 2017)**

Berikutnya pada pemberitaan tanggal 05 Desember 2017 diakhiri dengan tanggapan dari narasumber yang berbeda. Kalimat penutup di bawah ini merupakan sambungan dari *headline* yang sama, namun isi beritanya sudah tidak fokus pada permasalahan pemerataan lahan yang terjadi di sekitar lingkungan rumah Ponirah. Berikut wartawan mengemas pemberitaan tentang Fajar yang mengungsikan anaknya agar dapat bersekolah tanpa merasakan gangguan akibat dari pembangunan bandara tersebut:

**Sama dengan warga yang lain, Fajar juga mengungsikan anaknya yang duduk di bangku kelas X SMA dan kelas I SD. Apalagi anaknya yang di SMA sedang menempuh ujian. Namun ia menyebutkan, kedua anaknya tersebut sempat menolak diungsikan dan akan bersama orangtuanya ikut mempertahankan rumahnya. (05 Desember 2017)**

Selanjutnya penutup pada pemberitaan yang ketiga yang merupakan pernyataan dari Wakil Kapolres Kulon Progo, Kopol Dedi Suryadarma yang mengatakan bahwa ada sejumlah relawan yang tinggal di Kulon Progo tanpa memiliki izin tinggal. Mereka diduga melakukan provokasi warga agar bersikukuh untuk tidak melepaskan lahannya. Beberapa relawan tersebut ternyata merupakan mahasiswa.

**“Mereka yang masih mahasiswa akan kami tanya ke universitasnya, apa benar ini mahasiswanya. Karena berdasar laporan intel pihak kampus tidak pernah mengeluarkan izin seperti ini. Ini ilegal,” jelasnya. (06 Desember 2017)**

Selanjutnya penutup pada berita edisi 09 Desember 2017 memberikan deskripsi dari pernyataan pihak berwenang sebagai penguat *headline*, *lead*, dan latar informasi yang terdapat di kedua berita tersebut seperti yang terdapat dalam kalimat di bawah ini:

**“Pembangunan NYIA telah ditetapkan oleh Keputusan Presiden dan perlu didukung demi kepentingan negara dan masyarakat yang lebih luas. Mohon kerelaan dan kesediaan warga segera mengambil uangnya di PN Wates,” kata dia. (09 Desember 2017)**

Struktur analisis selanjutnya adalah skrip. Struktur ini merupakan analisis mengenai bagaimana wartawan mengaitkan berita yang dapat dilihat melalui unsur 5W+1H (*who*, *what*, *where*, *when*, *why*, dan *how*). Dalam pemberitaan di atas, unsur yang paling menonjol adalah *who* dan *how*. Kedua unsur ini ditampilkan dalam keempat berita di atas dengan menyebutkan beberapa warga dan beberapa pihak terkait yang menjadi narasumber dalam memberikan pernyataan tentang apa yang terjadi pada

saat pengosongan lahan tersebut berlangsung. Unsur *how* memaparkan tentang bagaimana kondisi warga terdampak pembangunan bandara NYIA pasca pengosongan lahan yang ditampilkan pada pemberitaan di atas.

Selanjutnya struktur tematik, yaitu cara untuk menemukan tema besar yang dibawakan pada suatu berita. Pada ketiga pemberitaan sebelumnya, mengangkat tema yang sama yaitu mengenai penolakan penggusuran dengan berbagai bentuk pertahanan warga terdampak pembangunan bandara NYIA. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari narasumber langsung dari warga terkait. Elemen pada struktur tematik yang dapat dilihat dari pemberitaan ini yaitu koherensi. Berikut merupakan koherensi dari ketiga berita yang digunakan seperti pada kalimat:

- Toh, Hermato **dan** warga lain bersikeras tak ingin meninggalkan tanah leluhurnya sejangkal pun. **(03 Desember 2017)**
- Untuk itulah, Ponirah **dan** suaminya menganggap **bahwa** langkah untuk melawan upaya penggusuran paksa tersebut **hanya** bisa dilakukan jika ia masuk ke dalam rumahnya. **(05 Desember 2017)**
- Padahal, ia **dan** sejumlah warga yang masih bertahan **hanya** ingin mempertahankan apa yang memang menjadi haknya. **(06 Desember 2017)**

- Warga terdampak yang masih mendiami rumah-rumah di dalam lahan bandara menolak menerima surat penetapan konsinyasi maupun surat peringatan pengosongan lahan **dan** bangunannya.  
**(09 Desember 2017)**

Penggunaan kata hubung **dan** dalam kalimat pemberitaan pertama menjelaskan bahwa penolakan yang dilakukan merupakan dari seluruh warga yang menjadi korban penggusuran. Kemudian kata **bahwa** yang digunakan dalam kalimat pemberitaan selanjutnya menjelaskan pada saat penggusuran terjadi, warga tersebut tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan upaya penggusuran paksa selain tetap berada di dalam rumahnya. Pada pemberitaan yang terakhir, kata **hanya** yang digunakan menjelaskan keinginan warga dan usaha yang dilakukan warga untuk mempertahankan hak-hak atas tanah dan rumah mereka. Dapat disimpulkan bahwa struktur tematik yang terdapat pada ketiga berita di atas merupakan koherensi penjelas.

Struktur berikutnya yaitu retorik. Retorik merupakan unsur yang akan memperlihatkan bagaimana wartawan menekankan sebuah fakta dengan pemilihan pemakaian kata, idiom, gambar atau foto, dan grafik. Pada bingkai dari ketiga pemberitaan ini, terdapat unsur leksikon dan grafis. Seperti pemberitaan tanggal 03 Desember 2017 kata **gelap gulita** yang digunakan oleh wartawan dalam menggambarkan kondisi pemukiman

warga yang diputus aliran listriknya. Kemudian pada kalimat “sesampainya di lokasi lahan mega proyek tersebut yang terlihat tak lebih dari sebuah **kota mati**” yang terdapat pada *lead*, dijelaskan melalui bahasa *feature* mengenai kondisi yang sedang terjadi di daerah pemukiman warga yang akan dijadikan calon lahan bandara nantinya.

Kemudian pemberitaan tanggal 05 Desember 2017 kata **akhir hayat** yang digunakan pada headline “Saya Akan Bertahan Sampai Akhir Hayat” yang dimaksudkan bahwa Ponirah sebagai salah satu warga penolak bandara yang tidak akan meninggalkan rumahnya sampai ia mati. Terakhir pemberitaan tanggal 06 Desember 2017 pada kalimat “Mereka **pasang badan** menghalangi aparat kepolisian yang mulai **merangsek** ke halaman rumah Fajar.”, kata pasang badan dimaksudkan untuk para warga yang sedang melawan pihak berwenang yang sedang melaksanakan tugas pembersihan lahan. Pemakaian kata pasang badan sendiri memiliki konotasi yang negatif. Kata merangsek juga dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa pihak berwenang tersebut sedang mencoba mendesak atau memaksa masuk ke halaman rumah salah satu warga tersebut.

Selanjutnya kata **bergayung sambut** pada pemberitaan tanggal 09 Desember 2017 yang digunakan oleh wartawan dalam kalimat “Niatan PT Angkasa Pura I untuk mempercepat pengosongan lahan pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon,

kembali tak bergayung sambut.”, dimaksudkan pada warga yang masih tetap menolak untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan mengacuhkan pihak berwenang.

Penggunaan tambahan grafis berupa gambar berwarna yang diletakkan pada halaman pertama untuk pemberitaan tanggal 03 Desember 2017 di desain dengan dominan warna hitam beserta denah rumah warga. Gambar tersebut seperti ingin menggambarkan keadaan beberapa rumah warga yang tersisa berada di kota tak berpenghuni. Terdapat juga dua buah foto lainnya dengan gambar berwarna berupa peta penampakan bandara NYIA dari udara.

Selanjutnya gambar yang terdapat pada halaman pertama edisi 05 Desember 2017 terdapat beberapa foto yang menampilkan keadaan yang terjadi selama proses pengosongan lahan. Sebuah foto menggambarkan sebuah alat berat yang sedang meratakan sebuah bangunan milik warga dengan ukuran hampir setengah halaman. Kemudian empat buah foto lainnya berukuran kecil dengan gambar yang berbeda. Ada foto beberapa warga yang sedang melakukan doa bersama, dua alat berat yang sedang meratakan sebuah rumah ibadah, dua orang siswi mengayuh sepeda melintasi bangunan yang sudah rubuh, dan sebuah pintu rumah warga dengan tulisan penolakan beserta beberapa aparat yang sedang berkumpul di halaman rumahnya.

Untuk edisi 06 Desember 2017 terdapat tujuh buah foto berwarna yang diletakkan pada halaman pertama di bagian atas dengan satu buah foto dengan ukuran hampir dari setengah ukuran koran, kemudian dua buah foto berukuran sedang pada bagian tengah, dan empat buah foto lainnya dengan ukuran lebih kecil yang terletak di bagian bawah koran. Foto yang terletak di bagian atas dengan ukuran lebih besar menampilkan seorang wanita yang menyaksikan sebuah alat berat sedang meratakan tanaman milik warga. Kemudian dua buah foto pada bagian tengah menampilkan seorang polisi sedang memberikan minuman kepada seorang pria yang tampak lemas dan seorang pria dengan balutan kain kasa berdarah di kepalanya. Empat buah foto terakhir menampilkan beberapa warga juga aparat yang sedang berjaga dan mengamankan proses pembersihan lahan dengan alat berat yang siap merubuhkan beberapa bangunan.

## 2. *Frame*: Penanganan AP I terhadap Penolakan Pembangunan NYIA

### STRUKTUR SINTAKSIS

No.	Terbit	Headline
1	03 Desember 2017	Senin Besok AP I Tempuh Langkah Serius
2	04 Desember 2017	Pemkab Siapkan Rusunawa Triharjo
3	06 Desember 2017	Polisi Akhirnya Bebaskan 15 Aktivis
4	07 Desember 2017	AP I Berharap Warga Ikhlas
5	08 Desember 2017	Warga Diminta Jangan Persulit Situasi
<i>Lead</i>		
1	03 Desember 2017	PT Angkasa Pura I siap menempuh

		langkah serius terkait kelanjutan megaproyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon. Mulai Senin, 4 Desember 2017 nanti, pemrakarsa pembangunan bandara itu siap membabat habis seluruh lahan dan bangunan yang masih tersisa.
2	04 Desember 2017	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyiapkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk menampung warga terdampak pembangunan bandara yang dimungkinkan tergusur secara paksa. Pasalnya, menurut rencana, PT Angkasa Pura (AP) I bakal melakukan langkah pengosongan pada Senin (4/12) ini. Praktis, puluhan warga penolak bandara yang masih bertahan bakal tergusur secara paksa.
3	06 Desember 2017	Sebanyak 15 orang relawan aksi solidaritas yang sempat diamankan aparat Polres Kulon Progo di Temon, Selasa (5/12) akhirnya dilepaskan. Mereka dicituk petugas karena diduga melakukan provokasi terhadap warga penolak pembangunan bandara saat berlangsungnya pengosongan lahan di wilayah Temon, Selasa siang.
4	07 Desember 2017	PT Angkasa Pura I (AP I) Yogyakarta memastikan kalau pihaknya bersama aparat tidak melakukan pengosongan dan pembongkaran rumah warga secara paksa, pada Selasa (5/12) lalu. Khususnya bagi mereka yang

		menolak dan masih bertahan di kediaman.
5	08 Desember 2017	Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo teradang jalan buntu dalam menyikapi warga penolak pembangunan bandar udara (bandara) New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon. Upaya pendekatan persuasif mentok karena pintu komunikasi dengan warga kian tertutup.
<b>Latar Informasi</b>		
1	03 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saat ini AP I masih berusaha mendekati warga yang bertahan untuk segera berubah pikiran dan pindah mengosongkan lahan. Namun, bila hingga 4 Desember itu warga tetap saja bersikeras menolak pindah, AP I menurut Pandu akan meminta pemerintah daerah untuk turun tangan.</li> <li>• Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulon Progo, Astungkara mengatakan soal pengosongan lahan itu menjadi ranah hak AP I setelah keluarnya putusan pengadilan atas konsinyasi lahan. Pihaknya tak bisa berbuat banyak atas kondisi warga yang masih bertahan di dalam cakupan lahan bandara mengingat sudah ada putusan hukum tetap atas proses pembebasan lahan tersebut, yakni melalui konsinyasi di pengadilan.</li> </ul>
2	04 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catatan Tribun Jogja, rusunawa di Kulon Progo hanya ada dua lokasi yang kesemuanya berada</li> </ul>

		<p>di Kecamatan Wates. Yakni Rusunawa Triharjo dan Rusunawa Giripeni. Namun Rusunawa Geripeni hingga kini belum siap huni sehingga lokasi paling memungkinkan di Rusunawa Triharjo. Rusunawa ini belum seluruh kamarnya terpakai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi yang didapat dari Ketua Paguyuban Penghuni Rusunawa Triharjo, Sutarto, ada sekitar 40 kepala keluarga terdampak bandara di Temon akan menghuni rusun tersebut.</li> <li>• Sutarto juga mengatakan bahwa pihak DPU sudah punya daftar calon penghuninya dan tinggal koordinasi dengan lurahya. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut.</li> </ul>
3	06 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelumnya, 15 relawan aksi solidaritas dicituk aparat kepolisian dalam kericuhan di tengah berlangsungnya kegiatan pembersihan lahan pembangunan bandara di wilayah Temon, Selasa (5/12).</li> <li>• Data dihimpun, 12 orang relawan diamankan saat pengosongan lahan pagi hari di Desa Palihan, sedangkan tiga orang lain diamankan menjelang sore di Desa Glagah. Tiga di antara</li> </ul>

		<p>belasan relawan itu diketahui merupakan pegiat organisasi pers mahasiswa (persma) dari beberapa kampus di Yogyakarta.</p>
4	07 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih lanjut, Sujiastono berharap, warga yang selama ini menentang proyek NYIA, bisa luluh dan segera merelakan kediamannya. Menurutnya hal tersebut demi kebaikan warga sendiri, lantaran kehidupan mereka di lingkungannya saat ini, sudah tidak nyaman lagi.</li> <li>• Kepolisian Resor Kulon Progo kembali membantah tegas adanya dugaan tindak kekerasan kepada sejumlah aktivis solidaritas saat berlangsungnya kegiatan pengosongan lahan pembangunan bandara di Temon, Selasa (5/12) lalu. Polisi justru menilai keberadaan para aktivis memprovokasi warga dan memperlambat jalannya proses pengosongan lahan.</li> </ul>
5	08 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Astungkara menyatakan bahwa pemkab bakal terus melakukan pendekatan kepada warga yang masih menolak agar merelakan lahan dan bersedia pindah dari area izin penetapan lokasi alias IPL pembangunan bandara NYIA.</li> <li>• Pemkab Kulon Progo, ia melanjutkan, meminta kepada PT</li> </ul>

		<p>Angkasa Pura I sebagai pemrakarsa pembangunan untuk menjalankan pekerjaan lain di luar petak lahan yang masih dihuni oleh warga. Ia tak memungkiri bahwa persoalan penolakan warga dan pembebasan lahan yang belum usai menjadi pekerjaan yang harus segera tuntas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatkala tidak mau mengambil dana ganti rugi yang terkonsinyasi, warga tidak bisa melakukan apa-apa. Lahan mereka tercakup dalam area IPL bandara NYIA. Hal itu membuat warga bakal terisolasi dan mempersulit situasi. Di lain sisi, sikap mereka untuk bertahan justru berpotensi mengganggu proses belajar anak-anak mengingat aliran listrik sudah terputus.</li> </ul>
<b>Kutipan, Sumber, Pernyataan</b>		
1	03 Desember 2017	<p>Agus Pandu Purnama (<i>General Manager</i> Bandara Adisutjipto)</p> <p>“Ini kan PSN dan AP I mendapat amanat dari Kejati. Pengosongan lahan itu karena kebutuhan dan kita sudah memberi peringatan sejak lama dan periodik hingga tiga kali. Kalau tidak segera kosong, lalu kapan kita bisa membangun?”</p>
2	04 Desember 2017	<p>Sutarto (Ketua Paguyuban Penghuni Rusunawa Triharjo)</p>

		“Saya disuruh untuk bersihkan kamar dan pasang keran serta ngisi pulsa listriknya. Sekarang sudah siap huni.”
3	06 Desember 2017	AKBP Irfan Rifai (Kapolres Kulon Progo)  “Kami bebaskan sekitar pukul 20:30. Mereka hanya kami mintai keterangan dan didata saja.”
4	07 Desember 2017	Sujiastono ( <i>Project Manager</i> Pembangunan NYIA PT AP I)  “Kami harap warga segera keluar. Lebih cepat, lebih baik, sehingga mereka bisa membuat tatanan kehidupan yang lebih baik pula. Kalau misal tidak ada rumah, kan Pemda sudah sediakan rumah susun. Pemda sudah siapkan semuanya, tinggal warga mau atau tidak.”
5	08 Desember 2017	Astungkara (Sekretaris Daerah Kulon Progo)  “Kami sebenarnya merasa kasihan. Namun, kami juga menemui jalan buntu untuk mendekati dan berkomunikasi dengan mereka. Untuk sementara, kami lebih baik pilih mendinginkan situasi.”
<b>Penutup</b>		
1	03 Desember 2017	“Karena ini serba dadakan, ya rusunawa yang kosong saja untuk ditempati,” tandas Astungkara.
2	04 Desember 2017	“Pihak DPU sudah punya daftar calon penghuninya dan tinggal

		koordinasi dengan lurahnya. Tapi ya sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” kata dia.
3	06 Desember 2017	Terkait dugaan tindak provokasi oleh relawan aksi, pihaknya mengaku belum mendengar kejelasannya. Hal itu akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait.
4	07 Desember 2017	“Hak masih melekat kepada warga. Kami ingin membantu dengan apa saja yang bisa kami lakukan untuk warga,” kata Heronemus.
5	08 Desember 2017	Belum cukup, kepada masyarakat, Hasto juga meminta supaya tidak berat sebelah. Dalam artian, selain mengetahui penolakan yang sebenarnya dilakukan oleh segelintir oknum, masyarakat juga diminta untuk mendengarkan suara rakyat banyak yang sama-sama tergusur.

Bingkai yang terlihat pada ketiga berita di atas merupakan beberapa langkah pihak berwenang dalam menangani tindakan warga yang menolak adanya pembangunan tersebut. *Headline* kelima pemberitaan di atas memberikan kesan tegas beberapa pihak berwenang dalam penanganan terkait pengusuran yang akan dilaksanakan secepatnya. Dalam tema ini yang dominan menjadi narasumber adalah pihak berwenang seperti *General Manager* Bandara Adisutjipto, Kapolres Kulon Progo, Sekretaris Daerah Kulon Progo, dan Ketua Paguyuban Penghuni Rusunawa Triharjo. Adanya beberapa narasumber tersebut memberikan pandangan dari sisi

yang berbeda dari tiga pemberitaan sebelumnya. Tema *frame* dari ketiga pemberitaan ini ingin menyampaikan bahwa semua yang telah dilakukan pihak berwenang sudah sesuai dengan prosedur.

Berita edisi 03 Desember 2017 dengan *headline* “Senin Besok AP I Tempuh Langkah Serius” memaparkan mengenai pihak AP I yang secara tegas akan melaksanakan tugas untuk segera membersihkan lahan yang masih dihuni oleh beberapa warga. Seperti yang dapat dilihat pada *lead* berikut:

**PT Angkasa Pura I siap menempuh langkah serius terkait kelanjutan megaproyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon. Mulai Senin, 4 Desember 2017 nanti, pemrakarsa pembangunan bandara itu siap membabat habis seluruh lahan dan bangunan yang masih tersisa. (03 Desember 2017)**

Kemudian edisi selanjutnya pada 04 Desember 2017 yang berisi mengenai Pemerintah Kabupaten yang telah menyediakan rumah susun untuk warga tergusur yang belum memiliki tempat tinggal. *Lead* tersebut cenderung menegaskan agar warga segera meninggalkan tempat tinggal mereka karena pengosongan lahan akan segera dilakukan seperti yang terdapat pada kalimat berikut:

**Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyiapkan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk menampung warga terdampak pembangunan bandara yang dimungkinkan tergusur secara paksa. Pasalnya, menurut rencana, PT Angkasa Pura (AP) I bakal melakukan langkah pengosongan pada Senin (4/12) ini. Praktis, puluhan warga penolak bandara yang masih bertahan bakal tergusur secara paksa. (04 Desember 2017)**

Berikutnya *lead* berita edisi 06 Desember 2017 berisi tentang 15 aktivis yang akhirnya dibebaskan oleh polisi karena diduga telah melakukan provokasi terhadap warga penolak bandara NYIA saat kegiatan pengosongan lahan sedang berlangsung. seperti yang dapat dilihat pada kalimat *lead* berikut:

**Sebanyak 15 orang relawan aksi solidaritas yang sempat diamankan aparat Polres Kulon Progo di Temon, Selasa (5/12) akhirnya dilepaskan. Mereka dicituk petugas karena diduga melakukan provokasi terhadap warga penolak pembangunan bandara saat berlangsungnya pengosongan lahan di wilayah Temon, Selasa siang. (06 Desember 2017)**

*Lead* pada edisi 07 Desember 2017 membahas tentang AP I yang menjelaskan kejadian pada saat pemerataan bangunan dan tanaman tanggal 05 Desember 2017 lalu tidak dilakukan secara paksa. Kepastian tersebut dapat dilihat pada kalimat *lead* berikut:

**PT Angkasa Pura I (AP I) Yogyakarta memastikan kalau pihaknya bersama aparat tidak melakukan pengosongan dan pembongkaran rumah warga secara paksa, pada Selasa (5/12) lalu. Khususnya bagi mereka yang menolak dan masih bertahan di kediaman. (07 Desember 2017)**

Selanjutnya, *lead* tanggal 08 Desember 2017 merujuk pada pemberitaan sebelumnya yaitu mengenai kelanjutan dari *mandeg*-nya proses pembangunan bandara akibat masih terdapatnya warga yang menolak megaproyek menempati rumah-rumah mereka dimana rumah mereka berada di atas cakupan lahan proyek pembangunan.

**Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo teradang jalan buntu dalam menyikapi warga penolak pembangunan bandar udara (bandara) New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon. Upaya pendekatan persuasif mentok karena pintu komunikasi dengan warga kian tertutup. (08 Desember 2017)**

Pada kalimat di atas, dapat disimpulkan bahwa warga penolak pembangunan bandara NYIA masih bersikukuh untuk tidak meninggalkan tempat tinggalnya. Pemkab Kulon Progo pun menyatakan bahwa upaya pendekatan persuasif yang dilakukan berujung buntu dikarenakan warga sendiri menutup komunikasi pada pihak berwenang yang terkait.

Latar informasi yang terdapat dalam berita tanggal 03 Desember 2017 menjelaskan usaha pihak AP I dalam mendekati warga agar segera berubah pikiran dan segera menempati rusunawa yang sudah disediakan. Persoalan pengosongan lahan juga sudah menjadi putusan AP I karena sudah dikeluarkannya keputusan hukum tetap atas proses pembebasan lahan. Namun jika beberapa warga masih memilih bertahan, resiko yang akan didapatkan yaitu turun tangannya pemerintah untuk membantu proses penggusuran. Seperti yang terdapat pada kalimat di bawah ini:

**Saat ini AP I masih berusaha mendekati warga yang bertahan untuk segera berubah pikiran dan pindah mengosongkan lahan. Namun, bila hingga 4 Desember itu warga tetap saja bersikeras menolak pindah, AP I menurut Pandu akan meminta pemerintah daerah untuk turun tangan. (03 Desember 2017)**

**Sementara itu, Sekretaris Daerah Kulon Progo, Astungkara mengatakan soal pengosongan lahan itu menjadi ranah hak AP I setelah keluarnya putusan pengadilan atas konsinyasi lahan. Pihaknya tak bisa berbuat banyak atas kondisi warga yang masih bertahan di dalam cakupan lahan bandara mengingat sudah ada putusan hukum tetap atas proses pembebasan lahan tersebut, yakni melalui konsinyasi di pengadilan. (03 Desember 2017)**

Selanjutnya latar informasi yang ada pada berita tanggal 04 Desember 2017 cenderung memberikan solusi atas pemberitaan sebelumnya, yaitu jika pada akhirnya warga tergesur, maka mereka bisa pindah untuk sementara ke rusunawa yang telah disediakan oleh Pemkab.

**Catatan Tribun Jogja, rusunawa di Kulon Progo hanya ada dua lokasi yang kesemuanya berada di Kecamatan Wates. Yakni Rusunawa Triharjo dan Rusunawa Giripeni. Namun Rusunawa Geripeni hingga kini belum siap huni sehingga lokasi paling memungkinkan di Rusunawa Triharjo. Rusunawa ini belum seluruh kamarnya terpakai. (04 Desember 2017)**

Ketua Paguyuban Penghuni Rusunawa Triharjo sendiri mengatakan bahwa sekitar 40 kepala keluarga akan menempati rusun tersebut, namun belum ada tindak lanjut seperti yang terdapat pada kalimat berikut:

**Informasi yang didapat dari Ketua Paguyuban Penghuni Rusunawa Triharjo, Sutarto, ada sekitar 40 kepala keluarga terdampak bandara di Temon akan menghuni rusun tersebut. (04 Desember 2017)**

**Sutarto juga mengatakan bahwa pihak DPU sudah punya daftar calon penghuninya dan tinggal koordinasi dengan lurahya. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut. (04 Desember 2017)**

Kemudian pada edisi 06 Desember 2017 berisi tentang pembebasan 15 aktivis yang diduga mengakibatkan keributan saat berjalannya kegiatan pembersihan lahan pada sehari sebelumnya. Mereka diamankan hanya

untuk dimintai keterangan terkait identitas dan kepentingan mereka di Desa Palihan.

**Sebelumnya, 15 relawan aksi solidaritas diciduk aparat kepolisian dalam keriuhan di tengah berlangsungnya kegiatan pembersihan lahan pembangunan bandara di wilayah Temon, Selasa (5/12). (06 Desember 2017)**

**Data dihimpun, 12 orang relawan diamankan saat pengosongan lahan pagi hari di Desa Palihan, sedangkan tiga orang lain diamankan menjelang sore di Desa Glagah. Tiga di antara belasan relawan itu diketahui merupakan pegiat organisasi pers mahasiswa (persma) dari beberapa kampus di Yogyakarta. (06 Desember 2017)**

Adapun latar informasi pemberitaan pada tanggal 07 Desember 2017 tentang pernyataan yang diberikan oleh Sujiastono selaku *Project Manager* Pembangunan NYIA PT AP I yang berharap agar warga yang selama ini menentang agar bisa luluh dan segera merelakan, seperti dalam kalimat berikut:

**Lebih lanjut, Sujiastono berharap, warga yang selama ini menentang proyek NYIA, bisa luluh dan segera merelakan kediamannya. Menurutnya hal tersebut demi kebaikan warga sendiri, lantaran kehidupan mereka di lingkungannya saat ini, sudah tidak nyaman lagi. (07 Desember 2017)**

Sujiastono mengatakan hal tersebut tidak serta merta tanpa alasan. Menurutnya, hal tersebut juga dilakukan untuk kebaikan warga, karena lingkungan disekitar rumah yang mereka tempati sudah tidak nyaman lagi.

Kemudian latar informasi berita edisi 08 Desember 2017 membenarkan pemberitaan sebelumnya. Berdasarkan *headline* yang

mengatakan bahwa warga mempersulit situasi, alasan yang masuk akal ada pada kalimat berikut:

**Tatkala tidak mau mengambil dana ganti rugi yang terkonsinyasi, warga tidak bisa melakukan apa-apa. Lahan mereka tercakup dalam area IPL bandara NYIA. Hal itu membuat warga bakal terisolasi dan mempersulit situasi. Di lain sisi, sikap mereka untuk bertahan justru berpotensi mengganggu proses belajar anak-anak mengingat aliran listrik sudah terputus. (08 Desember 2017)**

Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Astungkara mengatakan bahwa sikap yang dilakukan warga merugikan mereka sendiri, karena jika lahan disekitar rumah mereka sudah kosong, otomatis mereka berada pada wilayah yang terisolasi. Hal tersebut juga sangat berdampak pada aktivitas mereka sehari-hari nantinya.

Kembali pada pemberitaan pihak AP I yang menempuh langkah serius, Agus Pandu Purnama selaku *General Manager* Bandara Adisutjipto memberikan pernyataannya tentang proses pembersihan lahan yang berlangsung seperti berikut:

**Agus Pandu Purnama (*General Manager* Bandara Adisutjipto) “Ini kan PSN dan AP I mendapat amanat dari Kejati. Pengosongan lahan itu karena kebutuhan dan kita sudah memberi peringatan sejak lama dan periodik hingga tiga kali. Kalau tidak segera kosong, lalu kapan kita bisa membangun?” (03 Desember 2017)**

Menurut mereka, pengosongan lahan yang dilaksanakan bertahap dan sesuai dengan prosedur. Hanya saja warga tetap tidak mau meninggalkan tempat tinggal mereka yang nantinya akan menjadi calon lahan pembangunan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya proses

pembangunan bandara. Pihak mereka juga sudah mengantongi surat tugas dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY Nomor 1905 / LB05.01.2017 / PP mengenai pengosongan lahan tertanggal 25 November 2017. Selain itu juga terdapat Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan bandara dimana bandara NYIA sudah harus beroperasi pada April 2019. Pernyataan senada juga dilontarkan oleh pihak berwenang seperti berikut:

**Didik Tjatur (*Project Secretary* Pembangunan NYIA PT AP I)**  
**“Padahal proyek harus tetap berjalan. Jadi kita sekarang minta mereka keluar dari wilayah IPL. Kita lakukan bertahap dan ditargetkan akhir Desember ini semua selesai.” (03 Desember 2017)**

**Astungkara (Sekretaris Daerah Kulon Progo)** **“Ya (warga) harus mengikuti karena itu sudah putusan pengadilan.” (03 Desember 2017)**

Selanjutnya terkait rusun yang telah disediakan Pemkab Kulon Progo, PT AP I berencana akan melakukan pengosongan lahan pada 04 Desember 2017, sehingga secara otomatis warga penolak bandara yang masih bertahan akan pindah ke rusunawa tersebut. Sutarto membenarkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kulon Progo telah menghubungi langsung dan memintanya untuk mempersiapkan kamar hunian di gedung B seperti berikut:

**Sutarto (Ketua Paguyuban Penghuni Rusunawa Triharjo)** **“Saya disuruh untuk bersihkan kamar dan pasang keran serta ngisi pulsa listriknya. Sekarang sudah siap huni.” (04 Desember 2017)**

Kemudian pada pemberitaan mengenai pembebasan 15 relawan aksi solidaritas, diduga memprovokasi warga sehingga memicu terjadinya

bentrok antara warga dengan aparat yang sedang mengamankan kegiatan pengosongan lahan di wilayah Temon. Pernyataan pembebasan tersebut dibenarkan oleh Kapolres Kulon Progo seperti berikut:

**AKBP Irfan Rifai (Kapolres Kulon Progo) “Kami bebaskan sekitar pukul 20:30. Mereka hanya kami mintai keterangan dan didata saja.” (04 Desember 2017)**

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mendatangi Polres Kulon Progo pada sore harinya untuk mendampingi 15 relawan aksi solidaritas tersebut. Mereka menyayangkan tindakan represif aparat dan mengatakan bahwa pemerintah belum siap dengan adanya perbedaan sudut pandang dari masyarakat sehingga bentrokan tersebut tak terelakkan. Seperti yang terdapat pada pernyataan:

**Gandar Mahojwala (Koordinator Divisi Advokasi LBH Yogyakarta) “Seharusnya, aparat menjunjung tinggi instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aktivitasnya karena sudah diatur pula terkait bagaimana pengurusan paksa. Dari kejadian ini kami melihat pemerintah belum siap melihat adanya perbedaan pandangan di masyarakat.” (06 Desember 2017)**

Pada sumber, kutipan, dan pernyataan, dari ketiga berita di atas memberikan pernyataan yang tegas. Bersumber dari pihak berwenang secara langsung, berikut kalimat yang disampaikan *Project Manager* Pembangunan NYIA PT AP I sebagai penjelas atas *headline* berita pada tanggal 07 Desember 2017:

**Sujiastono (*Project Manager* Pembangunan NYIA PT AP I) “Kami harap warga segera keluar. Lebih cepat, lebih baik, sehingga mereka bisa membuat tatanan kehidupan yang lebih baik pula. Kalau misal tidak ada rumah, kan Pemda sudah sediakan rumah**

**susun. Pemda sudah siapkan semuanya, tinggal warga mau atau tidak.” (07 Desember 2017)**

Kalimat di atas memperkuat bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang sedang menemukan jalan buntu. Kalimat ini semakin memperkuat bingkai pemberitaan mengenai persoalan kesepakatan antara pihak berwenang dengan warga penolak bandara. Hampir sama dengan berita edisi 08 Desember 2017, kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kulon Progo, Astungkara yang menyatakan bahwa mereka akan mendinginkan situasi untuk sementara seperti yang terdapat dalam kalimat berikut:

**Astungkara (Sekretaris Daerah Kulon Progo) “Kami sebenarnya merasa kasihan. Namun, kami juga menemui jalan buntu untuk mendekati dan berkomunikasi dengan mereka. Untuk sementara, kami lebih baik pilih mendinginkan situasi.” (08 Desember 2017)**

Selain Sekretaris Daerah Kulon Progo, terdapat juga pernyataan dari Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo yang menyebut bahwa adanya campur tangan dari beberapa aktivis yang mencoba halangi pertemuan antara pihak berwenang dengan warga secara langsung. Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo juga meminta agar aktivis tidak melihat hanya pada sisi warga yang menjadi korban pengusuran, namun juga harus mengerti langkah apa saja yang sudah dilangsungkan pihak berwenang selama proses pembangunan megaproyek berjalan.

Pada bagian penutup pemberitaan tanggal 03 Desember 2017 merupakan sebuah kutipan pernyataan dari Sekretaris Daerah Kulon Progo:

**“Karena ini serba dadakan, ya rusunawa yang kosong saja untuk ditempati,” tandas Astungkara. (03 Desember 2017)**

Kalimat di atas menjelaskan soal pengosongan lahan yang memang terbilang mendadak. Namun Pemkab berupaya agar warga terdampak penggusuran memanfaatkan tempat tinggal sementara yang telah disediakan berupa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang telah dibangun di Wates.

Terkait rusunawa yang sudah disediakan untuk warga, penutup dalam pemberitaan selanjutnya yaitu pernyataan Ketua Paguyuban Penghuni Rusunawa Triharjo yang mengatakan bahwa sampai saat itu belum ada tindak lanjut mengenai kepindahan 40 kepala keluarga yang sudah berencana untuk menempati rusunawa tersebut.

**Sutarto (Ketua Paguyuban Penghuni Rusunawa Triharjo) “Pihak DPU sudah punya daftar calon penghuninya dan tinggal koordinasi dengan lurahnya. Tapi ya sampai sekarang belum ada tindak lanjut.” (04 Desember 2017)**

Sama dengan bagian penutup di atas, pemberitaan selanjutnya juga memberikan kalimat penutup yang disimpulkan oleh wartawan. Kalimat bernada ketidakpastian terkait benar atau tidaknya tindakan provokasi yang dilalukan oleh sejumlah relawan aksi seperti berikut:

**Terkait dengan tidak provokasi oleh relawan aksi, pihaknya mengaku belum mendengar kejelasannya. Hal itu akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait. (06 Desember 2017)**

Bagian penutup edisi 07 Desember 2017 yang merupakan bagian pernyataan yang diberikan oleh Koordinator Pantauan Lapangan Aliansi Tolak Bandara Kulon Progo, Heronemus Heron yang dijelaskan kembali dengan rangkaian kata yang telah dikemas oleh wartawan seperti berikut:

**Heronemus lantas membenarkan langkah penghalangan tim pengosongan lahan karena rumah yang akan dirobohkan itu milik warga penolak yang memiliki sertifikat hak milik. Konsinyasi hanya bisa dilakukan bila kedua belah pihak sepakat sedangkan warga bersangkutan jelas menolak menyerahkan tanah dan bangunannya untuk proyek pembangunan bandara tersebut. (07 desember 2017)**

Langkah penghalangan tim saat melaksanakan pengosongan lahan terjadi karena rumah yang saat itu hendak dirobohkan merupakan milik warga penolak dan warga tersebut juga masih memiliki sertifikat hak milik. Hal inilah yang mengakibatkan bentrok pada saat pembersihan lahan yang terjadi pada tanggal 05 Desember 2017 lalu antara pihak berwenang dengan warga penolak bandara.

Selanjutnya penutup pada berita edisi 08 Desember 2017 memberikan deskripsi dari pernyataan pihak berwenang sebagai penguat *headline*, *lead*, dan latar informasi yang terdapat di kedua berita tersebut seperti yang terdapat dalam kalimat di bawah ini:

**Belum cukup, kepada masyarakat, Hasto juga meminta supaya tidak berat sebelah. Dalam artian, selain mengetahui penolakan yang**

**sebenarnya dilakukan oleh segelintir oknum, masyarakat juga diminta untuk mendengarkan suara rakyat banyak yang sama-sama tergusur. (08 Desember 2017)**

Struktur analisis skrip dalam pemberitaan di atas lebih banyak membahas dengan unsur *what*, *who* dan *why*. Pembingkai di atas berusaha menunjukkan kepada pembaca atas persoalan kesepakatan antara pihak AP I dan warga Kulon Progo yang kian alot. Dari berbagai penggalan kalimat dalam ketiga berita di atas membuktikan bahwa kegiatan pembersihan lahan tersebut terjadi karena masih adanya penolakan dari warga, sehingga pihak berwenang pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu situasi yang sempat memanas menjadi kembali dingin.

Selanjutnya struktur tematik edisi 03, 04, 06, 07 dan 08 Desember 2017 yang dapat dilihat yaitu koherensi. Ketiga pemberitaan di atas mengangkat tema yang sama yaitu mengenai langkah pihak Bandara NYIA selanjutnya dalam menangani tindakan penolakan dari masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari berbagai narasumber dari beberapa pihak berwenang seperti *General Manager* Bandara Adisutjipto, *Project Secretary* Pembangunan NYIA PT AP I, Sekretaris Daerah Kulon Progo, Ketua Paguyuban Penghuni Rusunawa Triharjo, Kapolres Kulon Progo, Kepala Unit Reserse Kriminal Polres Kulon Progo, Kepala Desa Palihan, Anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ekspresi Universitas Negeri Yogyakarta, dan Koordinator Divisi Advokasi LBH Yogyakarta.

Koherensi dari ketiga berita yang digunakan terdapat pada kalimat berikut:

- ..., pemrakarsa pembangunan bandara itu siap membabat habis seluruh lahan **dan** bangunan yang masih tersisa. **(03 Desember 2017)**
- **Namun**, bila hingga 4 Desember itu warga tetap saja bersikeras menolak pindah, AP I menurut Pandu akan meminta pemerintah daerah untuk turun tangan. **(03 Desember 2017)**
- Pihak DPUPKP menyebut **bahwa** kepala desa asal warga itu akan datang untuk berkoordinasi dengannya. **(04 Desember 2017)**
- **Namun**, hingga kini belum ada tindak lanjut apapun. **(04 Desember 2017)**
- Mereka dicituk petugas **karena** diduga melakukan provokasi terhadap warga penolak pembangunan bandara saat berlangsungnya pengosongan lahan di wilayah Temon, Selasa siang. **(06 Desember 2017)**
- "... Mereka **hanya** kami mintai keterangan **dan** didata saja," kata Kapolres Kulon Progo, AKBP Irfan Rifai **dalam** pesan singkatnya kepada *Tribun Jogja*, Selasa malam. **(06 Desember 2017)**
- ..., warga yang selama ini menentang proyek NYIA, bisa luluh **dan** segera merelakan kediamannya. **(07 Desember 2017)**

- Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Astungkara, menyatakan **bahwa** Pemkab bakal terus melakukan pendekatan kepada warga yang masih menolak agar merelakan lahan **dan** bersedia pindah dari area izin penetapan lokasi alias IPL pembangunan bandara NYIA. **(08 Desember 2017)**

Setelah adanya kesiapan dari pihak berwenang untuk segera membersihkan lahan, penggunaan kata hubung **namun** sebagai koherensi pembeda dalam kalimat pemberitaan pertama menjelaskan bahwa jika masih ada warga yang tetap belum pindah, maka mereka akan meminta campur tangan dari pemerintah daerah. Kemudian kata **bahwa** dan **namun** yang digunakan dalam kalimat pemberitaan selanjutnya menjelaskan tentang pernyataan sebelumnya yang belum ditindak lanjuti. Pada pemberitaan yang terakhir, kata **dan** yang digunakan untuk menjelaskan 15 aktivis yang diduga menjadi provokator pada saat eksekusi pembersihan lahan hanya dimintai keterangan kemudian dibebaskan kembali.

Unsur leksikon dan grafis pada struktur retorik dari bingkai ketiga dapat ditemukan dalam pemberitaan di atas. Seperti pemberitaan tanggal 03 Desember 2017 kata **membabat habis** yang digunakan oleh wartawan dalam kalimat “Mulai Senin, 4 Desember 2017 nanti, pemrakarsa pembangunan bandara itu siap membabat habis seluruh lahan dan

bangunan yang masih tersisa.”, dimaksudkan untuk menjelaskan pemrakarsa pembangunan bandara tersebut untuk meratakan atau membersihkan lahan dan bangunan yang masih tersisa hingga rata dengan tanah.

Selanjutnya pada pemberitaan tanggal 06 Desember 2017 kata **diciduk** yang digunakan oleh wartawan dalam penggalan kalimat “Sebelumnya, 15 relawan aksi solidaritas **diciduk** aparat kepolisian dalam kericuhan di tengah berlangsungnya kegiatan pembersihan lahan pembangunan bandara di wilayah Temon, Selasa (5/12).”, dimaksudkan untuk menjelaskan tentang 15 aktivis yang ditangkap langsung oleh pihak berwenang karena diduga sebagai provokator.

Unsur leksikon dan grafis pada struktur retorik dalam dari ketiga pemberitaan di atas dapat ditemukan. Seperti pemberitaan tanggal 07 Desember 2017 kata **membabat habis** yang dimaksudkan meratakan bangunan dan tanaman yang telah ditinggalkan oleh penghuninya. Kata **teradang jalan buntu** pada pemberitaan tanggal 08 Desember 2017 yang digunakan oleh wartawan dalam kalimat “Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo teradang jalan buntu dalam menyikapi warga penolak pembangunan bandar udara (bandara) New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon.”, menjelaskan tentang Pemkab Kulon Progo yang sedang mengalami keberhentian sementara dalam

proses pembangunan bandara NYIA karena masih adanya warga penolak yang masih belum meninggalkan lokasi.

Unsur grafis hanya terdapat pada pemberitaan tanggal 04 Desember 2017, yakni sebuah foto tidak berwarna dengan gambar Rusunawa Triharjo yang nantinya akan menjadi tempat tinggal sementara untuk warga terdampak pengosongan lahan calon bandara NYIA.

## B. Bingkai Pemberitaan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat

### 1. *Frame*: Peran Pemerintah dalam Mendukung Pembangunan NYIA

#### STRUKTUR SINTAKSIS

No.	Terbit	Headline
1	03 Desember 2017	MENGACU PERPRES DAN SURAT PEMERINTAH KEJATI DIY Senin, Angkasa Pura Kosongkan Lahan
2	04 Desember 2017	SOAL PENGOSONGAN BANDARA Sultan: “Mosok Kudu Dipeksa”
3	05 Desember 2017	ADA AKSI MENOLAK BANDARA Tak Ganggu Pembersihan Lahan
4	06 Desember 2017	PETUGAS AMANKAN PENDATANG Ratakan Tanaman Sekitar Rumah Berpenghuni
5	07 Desember 2017	Pascapembersihan Lahan Polres Lepas 15 Aktivis
<b>Lead</b>		
1	03 Desember 2017	General Manager (GM) Bandara Adi Sudjipto PT Angkasa Pura (AP) I, Agus Pandu Purnama menegaskan, pihaknya harus melakukan

		pengosongan lahan. Apalagi dalam Peraturan Presiden (Perpres) New Yogyakarta International Airport (NYIA) di kawasan pesisir selatan Kecamatan Temon harus sudah beroperasi pada April 2019. Sehingga waktu untuk menyelesaikan pembangunan sarana transportasi udara tersebut tinggal beberapa bulan.
2	04 Desember 2017	Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengimbau warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di kawasan pesisir selatan Kecamatan Temon secara sadar mengosongkan lahan dan rumah mereka. Jangan sampai mereka pindah setelah dilakukan pemaksaan oleh pihak perusahaan pemrakarsa pembangunan bandara, PT Angkasa Pura (AP) I.
3	05 Desember 2017	Pekerjaan perobohan bangunan rumah warga dan pembersihan lahan terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Senin (4/12), berjalan lancar. Adanya aksi massa penolak pembangunan bandara tidak mengganggu tahapan pembersihan lahan atau <i>land clearing</i> .
4	06 Desember 2017	Perobohan tanaman hingga rata dengan tanah sekitar bangunan rumah berpenghuni menjadi fokus pada tahapan pembersihan lahan atau <i>land clearing</i> di Pedukuhan Kragon 1, Desa Palihan yang termasuk menjadi wilayah Izin Penetapan Lokasi (IPL)

		New Yogyakarta International Airport (NYIA), Selasa (5/12).
5	07 Desember 2017	Mapolres Kulon Progo melepas 15 aktivis yang diamankan pada saat berlangsung pembersihan lahan atau <i>land clearing</i> di wilayah Izin Penetapan Lokasi (IPL) New Yogyakarta International Airport (NYIA), Selasa (5/12) malam.
<b>Latar Informasi</b>		
1	03 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih lanjut Agus Pandu mengatakan, AP I melakukan pengosongan lahan sesuai prosedur. Salah satunya surat tugas dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY no 1905/LB05.01.2017/PP tentang Surat Tugas Pengosongan Lahan, tertanggal 24 November 2017. Sementara sampai saat ini masih ada sekitar 20 KK warga Desa Glagah dan 22 KK warga Palihan yang masih menolak pengosongan lahan.</li> <li>• Sekretaris Proyek Pembangunan NYIA, PT AP I Didik Tjatur menambahkan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi bagi warga yang lahannya telah dibebaskan oleh AP tapi tidak mau pindah.</li> </ul>
2	04 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “Sesuai kesepakatan dua hari lalu, warga mau pindah,” ucap Sultan di sela mengunjungi pengungsi dan lokasi banjir di Desa Krembangan Kecamatan Panjatan,</li> </ul>

		<p>Sabtu (2/12).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seperti diketahui hingga saat ini tercatat 42 kepala keluarga (KK) yang ngotot bertahan dan menolak pindah dari tempat lama mereka. Padahal proses pembebasan lahan bandara 26 November lalu.</li> <li>• Menurut Sultan, tanggung jawab pengosongan lahan berada di tangan PT AP I. pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan, apalagi warga juga sudah diberikan waktu dan kompensasi uang ganti rugi.</li> </ul>
3	05 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebanyak 264 personel meliputi unsur dari anggota Polres Kulon Progo, Brimob, Kodim, Radar Congot dan Satpol PP Kulon Progo diterjunkan, mengamankan pekerjaan merobohkan rumah dan pepohonan di pekarangan.</li> <li>• Kapolres Kulon Progo AKBP Irfan Rifai mengungkapkan, pengamanan pengosongan lahan berjalan lancar. Pengamanan petugas dikhususkan terhadap rumah warga yang sudah dikosongkan pemiliknya.</li> <li>• <i>Project manager</i> Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura (AP) 1 Sujiastono menjelaskan tidak ada pengusiran atau penggusuran di lahan bandara. Pembersihan lahan</li> </ul>

		hanya dilakukan terhadap rumah warga yang sudah dikosongkan pemiliknya.
4	06 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembersihan lahan diwarnai aksi massa dari Paguyuban Warga Pennolak Bandara Kulon Progo (PWPP-KP). Kepolisian mengamankan sekitar tiga orang dari belasan pendatang peserta aksi massa yang menghalangi petugas yang mengamankan pekerjaan pembersihan lahan.</li> <li>• Wakapolres Kulon Progo Kopol Dedy Surya Darma yang memimpin pengamanan pembersihan lahan IPL NYIA mengungkapkan kurang lebih tiga atau empat orang mengaku mahasiswa dari Yogyakarta.</li> <li>• <i>Project manager</i> Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura (AP) 1 Sujiastono menjelaskan pembersihan lahan difokuskan pekerjaan merobohkan tanaman rata dengan tanah sekitar rumah yang masih ditempati di wilayah IPL bandara.</li> </ul>
5	07 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapolres Kulon Progo AKBP Irfan Rifai SH mengungkapkan sebanyak 15 aktivis yang diamankan, semuanya berasal dari luar Kulon Progo. Para aktivis</li> </ul>

		<p>diduga berupaya menghalangi pengerjaan pembersihan lahan di IPL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurutnya, delapan orang tercatat sebagai mahasiswa UIN, dua mahasiswa UAD, dua mahasiswa UNY, satu mahasiswa Mercu Buana, satu mahasiswa UNS dan satu orang mengaku seniman.</li> <li>• Petugas melakukan tindakan tegas dan terukur dengan mengamankan para aktivis yang mengikuti aksi di wilayah IPL bandara tanpa ada pemberitahuan atau izin. Tindakan tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.</li> </ul>
<b>Kutipan, Sumber, Pernyataan</b>		
1	03 Desember 2017	<p>Agus Pandu Purnama (<i>General Manager</i> Bandara Adisutjipto)</p> <p>“Kebetulan AP I yang diberi amanat membangun bandara baru di Kulon Progo dan Senin (4/12) lahan akan dibersihkan. Pengosongan lahan juga tidak serta merta, kami jauh-jauh hari telah mensosialisasikan dan memberi peringatan kepada warga,” katanya saat jumpa pers di Rumah Makan Dapur Semar, Wates, Jumat (1/12) sore.</p>
2	04 Desember 2017	<p>Sri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur DIY)</p> <p>“<i>Mosok apa-apa kudu dipeksa,</i>”</p>

		<p>Ir RM Astugkoro SH MHum (Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo)</p> <p>“Masalah itu (pengosongan lahan-Red) <i>kan</i> sudah disampaikan. Lahan harus kosong,”</p>
3	05 Desember 2017	<p>AKBP Irfan Rifai (Kapolres Kulon Progo)</p> <p>“Untuk menghindari benturan atau gesekan antara petugas dengan massa, pengamanan pembersihan lahan dilakukan terhadap rumah warga yang sudah dikosongkan oleh pemiliknya,”</p>
4	06 Desember 2017	<p>Kompol Dedy Surya Darma (Wakapolres Kulon Progo)</p> <p>“Setelah dilakukan pengecekan tidak bisa menunjukkan kartu mahasiswa. Sudah dua hari tinggal di Palihan tanpa pemberitahuan atau melapor ke pemerintahan desa setempat,”</p>
5	07 Desember 2017	<p>AKBP Irfan Rifai (Kapolres Kulon Progo)</p> <p>“Setelah kami data, cek kesehatan dan dimintai keterangan dengan seizing Kapolda, mereka kami lepas tadi malam sekitar pukul 20:30,”</p> <p>“Dalam kegiatan kemarin tidak ada izin sehingga perlu tindakan tegas namun terukur. Jangan sampai ada penyusup tidak bertanggungjawab</p>

		memanfaatkan situasi, memutar balik fakta seolah-olah polisi melakukan tindakan keras,”
<b>Penutup</b>		
1	03 Desember 2017	“Konsekuensi pembangunan ini sangat baik untuk masyarakat Kulon Progo baik dari sisi peningkatan ekonomi maupun pembangunan wilayah,” ungkapnya.
2	04 Desember 2017	Berdasarkan informasi dari PT Angkasa Pura sampai saat ini tercatat 42 warga di Desa Glagah dan Palihan Kecamatan Temon yang tidak mau mengosongkan lahan dan rumah mereka. Warga tersebut menolak rencana pembangunan bandara baru di Temon, padahal uang kompensasi melalui proses konsinyasi dari PT AP I sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Wates.
3	05 Desember 2017	Sedangkan Proyek Sekretaris NYIA PT AP 1 Didik Tjatur menjelaskan pembersihan lahan dilakukan terhadap 38 rumah warga yang sudah dikosongkan di Desa Glagah dan Palihan. Pemiliknya sudah pindah ke tempat lain. Ganti rugi sudah dibayarkan secara konsinyasi (penitipan) di Pengadilan Negeri (PN) Wates.
4	06 Desember 2017	Menurutnya, pembersihan lahan Senin (4/12) dengan merobohkan 29 rumah yang dikosongkan. Setelah selesai meratakan tanaman dilanjutkan merobohkan rumah. “Setelah tanaman sekitar rumah dirobohkan, harapannya rumah yang

		masih ditempati agar segera dikosongkan,” ujar Sujiastono.
5	07 Desember 2017	Sementara dari pemantauan di IPL bandara NYIA, Rabu (6/12) tidak ada aktivitas pembersihan lahan. Mahasiswa yang tergabung di Aliansi Tolak Bandara Kulon Progo bertahan di rumah.

Pada bingkai pemberitaan ini, kelima berita menggunakan *headline* yang keseluruhannya menggambarkan tentang kebijakan pihak berwenang dalam melangsungkan berjalannya pembangunan megaproyek NYIA. Berbeda dengan headline pada pemberitaan Tribun Jogja, kalimat yang dikemas Kedaulatan Rakyat tidak berlebihan dan terkesan tegas dalam menggunakan *headline*, diantaranya dengan judul seperti;

- Mengacu Perpres dan Surat Pemerintah Kejati DIY Senin, Angkasa Pura Kosongkan Lahan
- Soal Pengosongan Bandara Sultan: “Mosok Kudu Dipeksa”
- Ada Aksi Menolak Bandara Tak Ganggu Pembersihan Lahan
- Petugas Amankan Pendatang Ratakan Tanaman Sekitar Rumah Berpenghuni
- Pascapembersihan Lahan Polres Lepas 15 Aktivistis

Kemudian pada *lead* yang disampaikan kelima berita di atas berisi kalimat-kalimat yang mendukung *headline*. Kedaulatan Rakyat membuat

bingkai yang terdapat pada kelima berita menarik karena sangat berbeda dengan kalimat-kalimat yang terdapat dalam pemberitaan di Tribun Jogja. Ketegasan pihak berwenang dalam menjalankan tugas pada tahapan pembersihan lahan dapat dilihat dalam lima berita tersebut. Pembangunan megaproyek NYIA tampaknya disampaikan oleh Kedaulatan Rakyat untuk menjelaskan bahwa surat kabar harian ini memiliki posisi sebagai media yang mendukung pembangunan Bandar NYIA.

Berikutnya yaitu latar informasi. Dari kelima berita di atas menggambarkan persoalan yang dihadapi oleh pihak berwenang dalam menangani warga penolak bandara. Kalimat yang digunakan Kedaulatan Rakyat juga memperkuat *frame* pemberitaan ini mengenai perkembangan kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan pihak berwenang. Seperti yang terdapat dalam pemberitaan tanggal 05 Desember 2017:

**Sebanyak 264 personel meliputi unsur dari anggota Polres Kulon Progo, Brimob, Kodim, Radar Congot dan Satpol PP Kulon Progo diterjunkan, mengamankan pekerjaan merobohkan rumah dan pepohonan di pekarangan. (05 Desember 2017)**

Kalimat di atas menyebutkan bahwa kegiatan pembersihan lahan yang terjadi di Kulon Progo berjalan aman dikarenakan adanya keberadaan aparat yang turut mengamankan pekerjaan tersebut.

Selanjutnya pada pemilihan narasumber dalam unsur kutipan, sumber, dan pertanyaan, Kedaulatan Rakyat lebih dominan berasal dari beberapa pihak yang berwenang dalam megaproyek ini, seperti Gubernur DIY,

*General Manager* Bandara Adisutjipto, *Project Secretary* Pembangunan NYIA PT AP I, *Project Manager* Pembangunan NYIA PT AP I, Kapolres, dan Wakapolres Kulon Progo. Isi dari keseluruhan pernyataan dari narasumber yaitu mengenai harapan mereka agar warga mengerti maksud dan tujuan dari pembangunan bandara ini. Seperti yang terdapat dalam kalimat pemberitaan di bawah ini:

**Didik Tjatur (*Project Secretary* Pembangunan NYIA PT AP I) “Teknik pengosongan lahan di lapangan, seluruh komponen akan hadir, Dinsos, Dinkes dan Pemkab. Kami akan membantu warga memindahkan barang-barang milik mereka. Pascaproses pengosongan pertama pada Senin (27/11) lalu, tercatat 17 warga akhirnya minta diukur. Memang masih ada warga yang bilang *pokoke* tidak mau pindah, dasar kami berita acara penolakan SP itu sendiri, semua sudah ditawarkan dan kami mau membantu,” (03 Desember 2017)**

**Sujiastono (*Project Manager* Pembangunan NYIA PT AP I) “Saat ini pekerjaan *land clearing* saja. Merobohkan bangunan yang sudah dikosongkan dan pepohonan pekarangan di wilayah IPL (Izin Penetapan Lokasi) bandara,” (05 Desember 2017)**

Pada kedua kutipan di atas, Kedaulatan Rakyat ingin memberikat gambaran bahwa kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan oleh pihak berwenang hanya dilakukan pada bangunan dan tanaman yang telah ditinggalkan oleh penghuninya. Mereka juga menawarkan bantuan kepada warga untuk membantu memindahkan barang-barang milik mereka. Untuk pemberitaan selanjutnya, keterangan yang diberikan oleh narasumber saat pemberitaan tentang kegiatan pascapembersihan lahan yang diwarnai aksi dari aktivis. Kehadiran aktivis yang merupakan

mahasiswa tersebut diharapkan untuk tidak memprovokasi warga setempat. Kapolres Kulon Progo sendiri mengatakan bahwa pengamanan yang mereka lakukan saat kondisi tidak kondusif lalu bersifat tegas dan terukur, seperti kalimat dibawah ini:

**Sujiastono (*Project manager* Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura (AP) 1) “Sebagai mahasiswa diharapkan tidak memprovokasi warga. Kompensasi sudah dibayarkan secara konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Wates,” (06 Desember 2017)**

**AKBP Irfan Rifai (Kapolres Kulon Progo) “Dalam kegiatan kemarin tidak ada izin sehingga perlu tindakan tegas namun terukur. Jangan sampai ada penyusup tidak bertanggungjawab memanfaatkan situasi, memutar balik fakta seolah-olah polisi melakukan tindakan keras,” (07 Desember 2017)**

Berikutnya pada bagian penutup pada kelima berita ini, membahas mengenai inti dari pemberitaan bahwa kegiatan pembersihan lahan masih terus berjalan walaupun masih ada beberapa warga yang memang tetap menolak untuk direlokasi. Kalimat penutup pada pemberitaan di atas saling berurutan dalam menjelaskan tahap-tahap keadaan selama terjadinya proses pembersihan lahan. Seperti yang dapat dilihat pada penutup pemberitaan tanggal 03 sampai dengan 07 Desember 2017:

**Sementara itu *Communication Departement* Head PT AP I, Awaludin mengatakan, proses pengosongan lahan merupakan konsekuensi dalam sebuah proyek pembangunan. Dirinya membantah pengosongan lahan pada minggu lalu melanggar hak asasi manusia (HAM). AP I menolak dikatakan menindas. (03 Desember 2017)**

**Berdasarkan informasi dari PT Angkasa Pura sampai saat ini tercatat 42 warga di Desa Glagah dan Palihan Kecamatan Temon yang tidak mau mengosongkan lahan dan rumah mereka. Warga**

**tersebut menolak rencana pembangunan bandara baru di Temon, padahal uang kompensasi melalui proses konsinyasi dari PT AP I sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Wates. (04 Desember 2017)**

**Sedangkan Proyek Sekretaris NYIA PT AP 1 Didik Tjatur menjelaskan pembersihan lahan dilakukan terhadap 38 rumah warga yang sudah dikosongkan di Desa Glagah dan Palihan. Pemiliknya sudah pindah ke tempat lain. Ganti rugi sudah dibayarkan secara konsinyasi (penitipan) di Pengadilan Negeri (PN) Wates. (05 Desember 2017)**

**Menurutnya, pembersihan lahan Senin (4/12) dengan merobohkan 29 rumah yang dikosongkan. Setelah selesai meratakan tanaman dilanjutkan merobohkan rumah. “Setelah tanaman sekitar rumah dirobohkan, harapannya rumah yang masih ditempati agar segera dikosongkan,” ujar Sujiastono. (06 Desember 2017)**

**Sementara dari pemantauan di IPL bandara NYIA, Rabu (6/12) tidak ada aktivitas pembersihan lahan. Mahasiswa yang tergabung di Aliansi Tolak Bandara Kulon Progo bertahan di rumah. (07 Desember 2017)**

Selanjutnya yaitu struktur skrip yang terdapat lebih banyak membahas pada unsur *what* dan *how*. Keseluruhan berita menceritakan tentang pihak berwenang yang menangani permasalahan pembangunan bandara NYIA. Kedaulatan Rakyat mengemas pemberitaan ini dari sudut pandang pihak berwenang. Berita-berita tersebut berisi tentang proses perkembangan pembangunan dari hari ke hari. Tidak terdapat pemberitaan yang menceritakan keadaan warga yang terkena dampak dari pembangunan bandara tersebut. Berikutnya pada tema besar dalam bingkai berita ini merupakan kebijakan pihak bandara NYIA dalam mengosongkan lahan yang menjawab *headline* berita.

Struktur retorik pada bingkai pemberitaan berikut membahas mengenai unsur leksikon dan grafis. Diantara kelima berita di atas, berita pertama sampai ke empat yang didapati menggunakan leksikon. Berikut kalimatnya:

Sekretaris Proyek Pembangunan NYIA, PT AP I Didik Tjatur menambahkan, pihaknya **tidak akan memberikan toleransi** bagi warga yang lahannya telah dibebaskan oleh AP tapi tidak mau pindah. **(03 Desember 2017)**

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X **mengimbau** warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di kawasan pesisir selatan Kecamatan Temon secara sadar mengosongkan lahan dan rumah mereka. **(04 Desember 2017)**

Menurut Sultan, tanggung jawab pengosongan lahan berada di tangan PT AP I. Pemerintah daerah **tidak lagi memiliki kewenangan**, apalagi warga juga sudah diberikan waktu dan **kompensasi** uang ganti rugi. **(04 Desember 2017)**

AKBP Irfan Rifai (Kapolres Kulon Progo) “Untuk menghindari **benturan atau gesekan** antara petugas dengan massa, pengamanan pembersihan lahan dilakukan terhadap rumah warga yang sudah dikosongkan oleh pemiliknya,” **(05 Desember 2017)**

Pembersihan lahan **diwarnai** aksi massa dari Paguyuban Warga Pennolak Bandara Kulon Progo (PWPP-KP). Kepolisian mengamankan sekitar tiga orang dari belasan pendatang peserta aksi massa yang menghalangi petugas yang mengamankan pekerjaan pembersihan lahan. **(06 Desember 2017)**

Pada penggalan kalimat di atas, Kedaulatan Rakyat menekankan makna yang ingin disampaikan dengan menggunakan kata lain, seperti **tidak akan memberikan toleransi** dan **mengimbau** yang menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam memberikan peringatan kepada warga agar segera meninggalkan tempat tinggal mereka. Kemudian kata **tidak**

**lagi memiliki kewenangan** menggambarkan bahwa keseluruhan proses pengosongan lahan menjadi tanggung jawab pihak AP I, tidak ada campur tangan dari pihak pemerintah. Kata **kompensasi** menggambarkan bahwa jika warga pindah, maka mereka mendapatkan uang ganti rugi. Kemudian kata **benturan atau gesekan** dan **diwarnai** menggambarkan tentang kondisi yang sedang terjadi pada saat proses pembersihan lahan berlangsung.

Unsur grafis hanya terdapat dalam seluruh pemberitaan kecuali tanggal 04 Desember 2017. Pada tanggal 03 Desember 2017 menampilkan foto berwarna dengan gambar Agus Pandu Purnama beserta rekan-rekannya yang berlatar Rumah Makan Dapur saat memberikan pernyataan mengenai rencana pengosongan lahan. Selanjutnya pemberitaan pada tanggal 05 Desember 2017 menampilkan foto berwarna dengan gambar sebuah alat berat yang sedang beroperasi mengerjakan pembersihan lahan yaitu perobohan bangunan dan tanaman yang sudah tak berpenghuni dengan pengawasan oleh seorang pria petugas kepolisian. Serupa dengan sebelumnya, pemberitaan tanggal 06 Desember 2017 menampilkan foto berwarna dengan gambar sebuah alat berat yang sedang mencoba merobohkan sebuah pohon. Terakhir pemberitaan tanggal 07 Desember 2017 menampilkan foto berwarna dengan gambar AKBP Irfan Rifai SH selaku Kapolres Kulon Progo beserta satu rekannya yang sedang memberikan pernyataan.

**C. Perbedaan Bingkai Pemberitaan Surat Kabar Harian Tribun Jogja dan Kedaulatan Rakyat**

No.	Tribun Jogja	Kedaulatan Rakyat
1.	Penolakan Warga Kulon Progo terhadap Pembangunan NYIA	
2.	Penanganan AP I terhadap Penolakan Pembangunan NYIA	Peran Pemerintah dalam Mendukung Pembangunan NYIA

Hasil yang didapatkan dari keseluruhan berita yang terdapat pada Surat Kabar Harian di atas memiliki jumlah bingkai yang berbeda. Dua bingkai dari Tribun Jogja dan satu bingkai dari Kedaulatan Rakyat dengan jumlah pemberitaan yang berbeda, yaitu sembilan berita dari Tribun Jogja dan lima berita dari Kedaulatan Rakyat.

Beberapa berita yang ditampilkan pada bingkai di atas dalam penyusunannya tentu tidak terlepas dari aktor-aktor media. Informasi yang terdapat di dalam berita merupakan sebuah realitas baru yang dibentuk oleh tim pembuat berita. Dapat dilihat bahwa terbentuknya sebuah berita dipengaruhi oleh redaksi, sehingga setiap individu yang membacanya pun dapat memaknai berita tersebut dengan berbeda seperti perbedaan bingkai pemberitaan yang dikemas oleh Tribun Jogja dan Kedaulatan Rakyat mengenai proses pembangunan megaproyek NYIA.

Perbedaan pertama yang akan dibahas adalah *headline* atau judul berita. Dari berbagai judul pemberitaan di atas, hal yang dapat dilihat adalah perbedaan pada masing-masing judul berita. Hal tersebut dikarenakan pada saat membaca sebuah berita, judul berita merupakan hal pertama yang dilihat oleh pembaca. Hal ini bisa dilihat pada bingkai pemberitaan pertama dalam surat kabar harian Tribun Jogja edisi 03 Desember 2017 dengan judul “**Senin Besok AP I Tempuh Langkah Serius**”. Isi dari beritanya membahas mengenai kelanjutan megaproyek pembangunan NYIA. Disebutkan juga berapa banyak bidang tanah yang akan masuk ke dalam cakupan izin penetapan lokasi. Penggunaan kata AP I yang diletakkan pada judul menjelaskan bahwasannya mereka adalah pemrakarsa pembangunan bandara NYIA, sehingga segala sesuatu yang terjadi sepenuhnya merupakan kebijakan mereka.

Terdapat pernyataan bahwa pihak AP I sudah mengantongi surat tugas dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY lengkap beserta nomornya mengenai pengosongan lahan calon bandara. Tak hanya itu, juga terdapat Peraturan Presiden (Perpres) mengenai percepatan pembangunan dan harus sudah beroperasi April 2019. Kemudian dalam berita tersebut juga terdapat penjelasan mengenai rumah susun yang disediakan untuk tempat tinggal sementara warga terdampak pengosongan lahan. Hal tersebut menjadi dasar pihak AP I dalam menjalankan tugasnya, namun di dalam pemberitaanya masih terdapat kalimat-kalimat yang memperlihatkan bahwasannya pekerjaan

AP I dalam mengosongkan lahan masih terkendala dengan warga yang bersikeras menolak untuk pindah.

Hal ini berbeda dengan pemberitaan oleh Kedaulatan Rakyat melalui judul “MENGACU PERPRES DAN SURAT PEMERINTAH KEJATI DIY **Senin, Angkasa Pura Kosongkan Lahan**”. Penggunaan huruf kapital dan tebal pada bagian judul berita seperti ingin menekankan kepada pembaca bahwa pengosongan lahan yang akan dilakukan berdasar pada perpres dan surat pemerintah kejati DIY. Selain itu, dilihat dari isi berita, sedikit mirip dengan Tribun Jogja namun Kedaulatan Rakyat menyajikan pemberitaan dengan padat dan jelas. Pihak AP I sendiri mengakui bahwa masih ada warga yang menolak untuk pindah dan mengatakan kalau proses pengosongan lahan memang merupakan konsekuensi dalam proyek ini.

Tidak sedikit judul yang tertera pada akhirnya tidak sesuai dengan isi berita yang dikemas, misalnya perbedaan judul berikutnya pada edisi 05 Desember 2017 tentang pemberitaan mengenai pengosongan lahan yang dilaksanakan tanggal 04 Desember 2017. Pada Tribun Jogja terdapat judul “**Saya Akan Bertahan Sampai Akhir Hayat**”. Penempatannya berada di halaman pertama dilengkapi dengan foto berwarna keadaan disana dan *font* judul yang mencolok. Isi dari judul berita tersebut menceritakan tentang seorang warga yang memilih bertahan di dalam rumah dengan tujuan menghadang alat berat agar tidak merobohkan rumahnya. Kalimat-kalimat bernada negatif terkait proses pengosongan lahan yang terjadi pada saat itu seakan ingin mengatakan

bahwa apa yang telah dilakukan oleh AP I sangat buruk. Melenceng dari judul utama, ternyata tidak hanya Ponirah yang ada dalam berita tersebut. Beberapa warga penolak lainnya dan beberapa pihak berwenang juga menjadi narasumber dan memberi pernyataannya yang bertolak belakang terkait pengosongan lahan pada saat itu.

Sedangkan judul pada Kedaulatan Rakyat adalah “**ADA AKSI MENOLAK BANDARA Tak Ganggu Pembersihan Lahan**”, dimana dapat dilihat secara jelas ada perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan judul pemberitaan dari Tribun Jogja. Pada judul tersebut mengatakan bahwa adanya aksi penolakan yang terjadi saat pembersihan lahan berlangsung tidak mengganggu. Perbedaan juga terlihat dari cara bagaimana kedua surat kabar dalam menyebut proses awal pembangunan bandara tersebut. Tribun Jogja menggunakan diksi **penggusuran**, sementara Kedaulatan Rakyat menggunakan diksi **pembersihan lahan**.

Berikutnya adalah bagaimana fokus berita diangkat melalui latar informasi dan narasumber. Melalui sembilan beritanya, dengan dua *framing*, satu *framing* berbau negatif; “**Penolakan Warga Kulon Progo terhadap Pembangunan NYIA**”. Satu berita lainnya positif; “**Penanganan AP I terhadap Penolakan Pembangunan NYIA**”.

Dari keenam berita di atas, Tribun Jogja secara dominan mengambil pernyataan dari narasumber yang berasal dari warga atau organisasi masyarakat terkait. Contoh, dari keenam berita, ada empat berita diantaranya

yang menggunakan warga sebagai narasumber. Kemudian dilengkapi dengan pernyataan dari pihak berwenang seperti Kapolres Kulon Progo, Sekretaris Daerah Kulon Progo, *Project Manager* dan *Project Secretary* Pembangunan NYIA PT AP I, dan *General Manager* Bandara Adisutjipto sebagai narasumber. Dari sini, seperti halnya Tribun Jogja menggunakan kekuatan para narasumber sebagai kekuatan mereka dalam membentuk *frame*. Latar informasi baik positif maupun negatif yang disajikan hampir sebanding. Sehingga, melalui latar informasi yang ada, Tribun Jogja memberitakan bahwa kontroversi pembangunan NYIA sangat berdampak negatif bagi warga, namun mereka juga memberitakan proses pembangunan bandara yang tetap berjalan.

Berbeda dengan Tribun Jogja, Kedaulatan Rakyat hanya memiliki lima berita yang membahas mengenai proses berjalannya megaproyek pembangunan NYIA. Seluruh pemberitaannya bersifat positif terkait proses demi proses yang berjalan selama megaproyek berlangsung. Latar informasi yang digunakan Kedaulatan Rakyat adalah bagaimana pengemasan pemberitaan tentang pembangunan megaproyek NYIA dari kaca mata yang positif. Bahkan diantara lima berita tersebut hanya sedikit yang membahas tentang konflik yang terjadi di dalamnya. Kedaulatan Rakyat tidak membangun *frame* permasalahan maupun bentuk penolakan dari warga yang terjadi selama proses pembersihan lahan tersebut berlangsung. Mereka lebih

menonjolkan kesiapan dari pihak berwenang seperti pemerintah dan AP I mengenai pembangunan bandara ini.

Terkait pemberitaan yang tegas, Kedaulatan Rakyat cenderung menggunakan orang-orang yang berwenang seperti Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kapolres dan Wakapolres Kulon Progo, Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo, *Project Manager* Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura (AP) I, Sekretaris Proyek Pembangunan NYIA PT AP I, *General Manager* Bandara Adisutjipto sebagai narasumber tetap. Semua digunakan Kedaulatan Rakyat untuk membangun kognisi mengenai kontroversi pembangunan NYIA yang terjadi tidak separah itu. Fokus berita yang diperlihatkan oleh Kedaulatan Rakyat bukan tentang bentrohnya warga setempat dengan pihak berwenang, melainkan proses pembangunan yang bertahap dan sesuai dengan dasar-dasar ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.

Lain halnya dengan Tribun Jogja, Kedaulatan Rakyat memiliki lima jumlah berita. Dalam membangun *framingnya* hanya terdapat satu *frame* saja dan itu bersifat positif; “**Peran Pemerintah dalam Mendukung Pembangunan NYIA**”. Jika dalam Tribun Jogja masih setengah-setengah dalam menampilkan berita yang positif-negatif, maka Kedaulatan Rakyat dengan jelas menampilkan bahwa proses pembangunan NYIA tidak memiliki kendala yang begitu serius seperti penolakan dan bentrok antar warga dengan pihak berwenang yang dikemas dalam pemberitaan Tribun Jogja. Dalam

membahas penolakan yang dilakukan warga pun Kedaulatan Rakyat tidak menitikberatkan pada latar kejadiannya atau apakah ada korban yang terjadi pada saat penolakan terjadi, namun mereka fokus pada detail proses pembersihan lahan sebagai tahap awal yang sedang berlangsung. Mereka juga membahas mengenai warga terdampak pembersihan lahan tersebut, namun dalam pemberitaannya, Kedaulatan Rakyat mengatakan bahwa warga difasilitasi seperti dibangunnya rusunawa untuk tempat tinggal sementara maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Secara garis besar, Tribun Jogja menghadirkan bingkai berita yang bisa dikatakan beragam, namun tetap menjurus kepada pro masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan dari berbagai elemen *framing* yang digunakan. Diawali dengan pemilihan judul, pemilihan tema, penggunaan diksi, info grafis, hingga narasumber yang dominan warga terdampak pembangunan NYIA. Kontroversi pembangunan NYIA yang dikemas oleh Tribun Jogja lebih menceritakan konflik warga yang masih menolak adanya pembangunan tersebut. Kontroversi pembangunan NYIA dikemas oleh Tribun Jogja dengan judul berita yang sangat menarik perhatian dan terkesan berlebihan. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai “jurnalisme kuning”.

Seiring runtuhnya rezim Orde Baru, fenomena jurnalisme kuning di Indonesia selain pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 mengenai Pers yang menggugurkan undang-undang tentang pers sebelumnya,

juga memiliki kelebihan dari Undang-Undang pada masa Orde Reformasi yaitu dengan dihapuskannya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan tidak adanya pembredelan. Sehingga hal tersebut memungkinkan siapa saja dapat bersaing di bidang penerbitan pers.

Jurnalisme kuning adalah sebuah praktik jurnalisme yang mengaburkan makna. Hal tersebut dikarenakan produk jurnalistik telah keluar dari substansi yang disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat penuh sensasi, sadis, vulgar, dan bahkan cabul yang demikian didramatisir hingga jauh dari realita yang ada (Malik, 2014: 2). Dapat dilihat mengenai kontroversi pemberitaan pembangunan NYIA yang dilakukan oleh Tribun Jogja dalam memunculkan *framingnya* terdapat beberapa judul yang sensasional sehingga menimbulkan pandangan dan pemikiran yang negatif bagi pembaca terkait megaproyek NYIA ini. Seperti contoh pemberitaan Tribun Jogja edisi 03, 05, 06, dan 09 Desember 2017.

Berkembangnya jurnalisme kuning di Indonesia lebih disebabkan oleh mekanisme pasar. Karena pers Indonesia sekarang sudah menjadi bagian dari pasar, maka hukum pasar-lah yang menentukan format isi media di Indonesia. Karena hukum pasar itu jika banyak mendapatkan permintaan, suplai produk juga banyak dan kontinyu, sehingga menghasilkan keuntungan yang banyak (Hidayatullah, 2016: 37).

Adapun secara umum *frame* yang digunakan oleh Kedaulatan Rakyat yaitu pro terhadap pemerintah. Dari satu *framing* yang ada, kelima beritanya mengandung isi yang serupa yaitu seperti yang dikatakan oleh *Communication Department Head* PT AP I, Awaludin bahwasannya

pembangunan ini sangat baik untuk masyarakat Kulon Progo baik dari sisi peningkatan ekonomi maupun pembangunan wilayah. Penggunaan narasumber yang dicantumkan, judul berita, bahasa yang dipilih, dan grafis yang digunakan Kedaulatan Rakyat sangat menggambarkan bahwa mereka sangat berhati-hati dalam mengemas berita dengan mengurangi kata yang secara eksplisit menyudutkan pihak tertentu melainkan lebih memberi penjelasan secara implisit. Seperti yang diketahui bahwa Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar yang terkesan mendeskripsikan dan menjadikan tindakan penolakan yang dilakukan oleh warga sebagai hal yang negatif. Sehingga secara keseluruhan mereka memberitakan langsung kepada inti dari berita tersebut, tidak bertele-tele juga sikap dan tanggapan pemerintah yang tegas.

Berdasarkan keterangan di atas, terlihat bahwa ditemukannya satu persamaan *frame* yang dibangun pada surat kabar harian Tribun Jogja maupun Kedaulatan Rakyat. Persamaan yang ditemukan yaitu bagaimana kedua surat kabar harian tersebut memberitakan mengenai bagaimana pemerintah dan pihak AP I dalam menyikapi maupun menanggapi terkait pembangunan bandara NYIA. Segmentasi pasar antar kedua surat kabar harian tersebut kemungkinan dapat menjadi dasar perbedaan pemberitaan yang dikemas karena Tribun Jogja tertuju pada kaum menengah kebawah sedangkan Kedaulatan Rakyat lebih kepada kaum menengah ke atas.

## **D. Faktor Pembeda Bingkai Pemberitaan Harian Tribun Jogja dan Kedaulatan Rakyat**

Pada aspek ini akan menjelaskan mengenai beberapa hal yang dapat memengaruhi perbedaan saat dikemasnya sebuah berita melalui dua level yaitu ekstramedia dan level organisasi. Pengaruh ekstramedia terhadap proses konstruksi berita meliputi sumber-sumber berita, kelompok berkepentingan, lingkungan bisnis, dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau peraturan-peraturan di bidang pers. Sedangkan pengaruh organisasi media merupakan tujuan dari media seperti mencari keuntungan dimana para pemilik modal biasanya akan menggunakan media sebagai alat konstruksi sosial untuk menguasai khalayak secara ekonomi dan politik. Setiap organisasi media memiliki tujuan, misi, visi, dan filosofi organisasi masing-masing, dimana berbagai elemen tersebut akan mempengaruhi bagaimana seharusnya wartawan bersikap dan bagaimana seharusnya peristiwa dikonstruksikan menjadi sebuah berita (Sobur, 2009: 138).

### **1. Level Ekstramedia**

#### **a. Pemerintah**

Kebebasan pers yang ada tidak terlepas dari sistem pemerintahan yang berlaku dalam sebuah negara. Ketat longgarnya sistem politik pemerintah dengan para penguasa menentukan seperti apa sistem pers yang berlaku pada negara tersebut. Menurut sejarah pers, sistem

pemerintahan Indonesia sangat lekat dengan para penguasa orde baru yang otoriter sehingga mengakibatkan pergerakan pers pada saat itu sangat terbatas. Menampilkan sisi positif pemerintah menjadi hal yang paling ditonjolkan dalam setiap media massa yang ada di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar pers tidak tersandung pembredelan yang dilakukan pemerintah yang berkuasa pada saat itu.

Selama pemerintahan Orde Baru, dinamika industri pers di Indonesia mengalami angka penjualan yang tidak stabil. Namun, ketika pemberlakuan dua perundang-undangan yang membuat sistem pers di Indonesia masuk dalam sistem otoritarian dimana negara mengawasi dan mengontrol pers agar aktivitas mereka tidak menyimpang. Dua perundang-undangan yang diberlakukan yaitu UU No. 11 tahun 1966 dan UU No. 21 tahun 1982. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa media harus mengikuti 13 aturan agar resmi bermedia, seperti media tersebut harus memiliki afiliasi dengan partai politik, badan usaha, serta tidak boleh memberitakan sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Pemerintah dengan pers saling berkaitan. Oleh karena itu korelasi antar keduanya dalam kontroversi pembangunan NYIA ini tidak dapat dihindari. Dari dua bingkai pemberitaan yang dibangun oleh Tribun Jogja, salah satunya lebih mendukung sikap warga Kulon Progo yang menolak adanya pembangunan NYIA. Dilihat dari latar belakang

perusahaan, Tribun Jogja merupakan anak perusahaan dari Kompas Gramedia Group. Secara tidak langsung, karakteristik yang dimiliki oleh harian Kompas terdapat pada Tribun Jogja. Harian Kompas sendiri identik dengan jurnalisme kepitng dimana pemberitaan yang dimuat cenderung pro pemerintah.

Istilah jurnalisme kepitng merupakan olok-olok dari Rosihan Anwar pada Kompas (St. Sularto dalam Kurniawan dan Nurcahyo, 2013: 78). Kepribadian Kompas bergerak ala kepitng, mencoba melangkah setapak demi setapak ala kepitng, untuk mengetes seberapa jauh kekuasaan memberikan toleransi kebebasan. Jika aman, kaki kepitng bisa maju beberapa langkah, jika kondisi tidak memungkinkan, kaki kepitng pun bisa mundur beberapa langkah.

Walau sempat diberhentikan sementara karena berurusan dengan rezim penguasa pada paruh dekade 90-an saat itu, dengan kehati-hatiannya sampai saat ini Kompas semakin besar (Zulfaningrum, 2014: 241). Melalui Sembilan berita yang ada, empat berita dengan *frame* penolakan warga Kulon Progo terhadap pembangunan NYIA dan lima berita lainnya dengan *frame* penanganan pihak AP I terhadap penolakan pembangunan NYIA yang dilakukan warga.

Dari hasil *frame* Tribun Jogja di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat keterlibatan pemerintah dalam pemberitaan di Tribun Jogja. Hal tersebut dikarenakan adanya dua buah hasil *frame* yang berbeda. Terlebih dari hasil penelitian, Tribun Jogja termasuk kepada jurnalisme kuning.

Berbeda dengan Tribun Jogja, Kedaulatan Rakyat menyajikan berita mengenai pemerintah yang sangat mendukung demi terwujudnya NYIA. Pemberitaan dalam surat kabar harian Kedaulatan Rakyat lebih memihak terhadap pemerintahan. Hal tersebut terbukti dari beberapa narasumber yang diwawancarai seperti yang telah dibahas sebelumnya. Melalui lima berita dalam satu *frame* yang sama, secara keseluruhan menyajikan secara langsung bagaimana pemerintah menyikapi dan menanggapi proses dari rangkaian pembangunan NYIA. Kedaulatan Rakyat juga menganggap apa yang dilakukan oleh gubernur dan pihak kepolisian seluruhnya sudah dijalankan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ada.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Rianto terhadap tiga Koran lokal di DIY, yakni Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja, dan Tribun Jogja. Hanya Kedaulatan Rakyat yang memberi porsi tinggi untuk berita politik dan pemerintahan (31.67%). Harian lain seperti Tribun Jogja bahkan memberikan porsi berita hukum dan kriminal yang jauh lebih tinggi (Rianto, 2017: 98).

#### **b. Narasumber**

Pada level ini memperlihatkan seperti apa hubungan media dengan lingkungan disekitarnya yang mana juga menjadi salah satu pengaruh dalam pengkonstruksian fakta terkait pemilihan narasumber. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pada setiap surat kabar harian memiliki karakternya masing-masing dalam menentukan narasumber. Tribun Jogja dalam hal ini menggunakan narasumber yang dominan

warga Kulon Progo yang menolak adanya pembangunan bandara dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang juga satu suara dalam mendukung warga Kulon Progo juga pihak AP I.

Dari Sembilan berita yang dimiliki Tribun Jogja, hampir seluruhnya didominasi dengan narasumber warga Kulon Progo yang menolak pembangunan NYIA, pihak AP I yang memberikan keterangan secara lebih lanjut mengenai proses dan hambatan selama pengosongan lahan berlangsung, serta pihak kepolisian dengan keterangan selama pengamanan berlangsung.

Kemudian penambahan keterangan dari lembaga-lembaga yang ada juga berisi tentang keberpihakan mereka mendukung warga dalam menolak pembangunan bandara. Pada masing-masing berita, tentu melalui ditampilkannya pendapat dari beberapa narasumber yang dipilih untuk dimuat ke dalam sebuah berita merupakan hasil dari garapan editor dan juga tim redaksi yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Bisa jadi terdapat kemungkinan jika wartawan tersebut melakukan pemilihan atau penyaringan terhadap narasumber yang akan diliput. Namun apa yang diutarakan atau dikatakan oleh narasumber sebenarnya adalah hasil dari pertanyaan yang ditanyakan wartawan ke narasumbernya.

Dalam hal ini, Tribun Jogja melalui berbagai narasumbernya menampilkan bagaimana pihak AP I dalam bertindak juga menampilkan

berbagai aspirasi warga Kulon Progo selama proses pengosongan lahan berlangsung. Hal tersebut dapat dilihat dalam *frame* **Penolakan Warga Kulon Progo terhadap Pembangunan NYIA** yang membahas mengenai penolakan yang dilakukan oleh warga Kulon Progo. Namun, pada *frame* selanjutnya merupakan tentang bagaimana AP I dalam menangani penolakan yang dilakukan Warga Kulon Progo terhadap pembangunan NYIA. Dari seluruh pemberitaan, Tribun Jogja mengemas dengan *headline* berita dengan kalimat yang menarik, dapat dikatakan cukup berlebihan karena terkadang sedikit melenceng pada isi beritanya. Sikap Tribun Jogja yang seperti itulah yang disebut dengan jurnalisme kuning.

Menurut Nurudin (2009) jurnalisme kuning merupakan jurnalisme pemburukan makna. Ini disebabkan karena orientasi pembuatannya lebih menekankan pada berita-berita sensasional dari pada substansi isinya. Muncul sekitar awal abad XVII atau saat surat kabar mulai dicetak dengan mesin cetak. Dengan dukungan percetakan tersebut, gambar dan jenis warna huruf yang digunakan dalam media tersebut menjadi lebih variatif. Penggunaan warna yang mencolok tersebut digunakan sebagai strategi untuk memikat calon pembaca (Hidayatullah, 2016: 36).

Berbeda dengan Tribun Jogja, Kedaulatan Rakyat menyajikan berita yang menjelaskan peran pemerintah dalam mendukung proses pembangunan NYIA. Melalui satu *frame* dari jumlah lima berita, hampir keseluruhannya menunjukkan keinginan dan peran pemerintah dalam mendukung AP I dalam proses pembangunan NYIA. Dalam lima berita tersebut secara intensif menggunakan pihak pemerintah sebagai

narasumbernya; Polisi, Gubernur, dan AP I. Hal ini dilakukan karena Kedaulatan Rakyat lebih cenderung mendeskripsikan megaprojek NYIA dari sudut pandang pemerintah dalam melaksanakan dan memberitahu bahwa megaprojek tersebut dapat memberi perubahan yang positif untuk semua pihak termasuk warga Kulon Progo. Sehingga bisa dilihat bagaimana Kedaulatan Rakyat menyusun narasumber yang berasal dari pemerintah.

Itulah yang menyebabkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembangunan NYIA seluruh narasumbernya mengambil peran pemerintah dalam mendukung megaprojek tersebut sebagai subjek utama. Tidak terdapat pendapat warga Kulon Progo dalam kelima pemberitaannya. Kedaulatan Rakyat membahas hal ini lebih secara umum, seperti bagaimana keadaan pasca pembersihan lahan dan apa efek yang ditimbulkan terhadap warga Kulon Progo kemudian juga bagaimana cara penyelesaian melalui ranah hukum yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, Kedaulatan Rakyat terlihat sangat mendukung terwujudnya NYIA dan tidak menampilkan sisi buruk terkait penolakan dari warga Kulon Progo yang menolak megaprojek tersebut.

## **2. Level Organisasi**

Pada level ini, pengelolaan media menjadi sesuatu yang lebih untuk diperhatikan. Aturan dan struktur dalam media menjadi dasar operasional pada suatu media. Peraturan yang lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan ini disebut dengan rutinitas media. adapun rutinitas media Tribun Jogja dan Kedaulatan Rakyat seperti berikut:

a. Orientasi Organisasi

Pada tahap ini membahas mengenai bagaimana media memproses sebuah berita sesuai dengan apa yang menjadi pandangan dalam sebuah organisasi, mulai dari memilih tema, penulisan berita, diterbitkannya berita, hingga sampai ke pembaca. Proses ini tentunya memiliki campur tangan dari editor yang menjadi *gatekeeper* juga kepentingan yang mengikat sebuah organisasi. Tribun Jogja merupakan anak media dari Kelompok Kompas-Gramedia. Hal tersebut menjadi dasar mengenai adanya kebijakan pemberitaan di Tribun Jogja yang diturunkan dari kebijakan harian Kompas. Tribun Jogja juga memiliki kepemilikan modal oleh Jakob Oetama dan PK. Ojong.

Selain itu mereka juga merupakan pendiri dan pemimpin di Kompas. Dari segi bisnis, Kompas dipimpin oleh PK. Ojong, sedangkan dalam bidang redaksional dipimpin oleh Jakob Oetama. Sepeninggal PK. Ojong yang wafat di tahun 80-an, kepemimpinan dalam bidang bisnis diambil alih oleh Jakob Oetama dimana ia juga menjabat sebagai pimpinan redaksi hingga tahun 2000. Mereka merupakan tokoh yang telah menetapkan nilai-

nilai yang sampai saat ini masih dijalankan oleh Kompas baik dalam organisasi maupun redaksi. Nilai dasar berupa *salus populi suprema lex* atau disebut keselamatan dan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi. (Sularto, 2007: 19).

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, Tribun Jogja secara tidak langsung menyiratkan akan nilai-nilai Kompas yang juga menjadi dasar redaksi mereka. Sehingga, idealisme jurnalis sangat kental dalam pengelolaan Tribun Jogja. Terdapat dalam beberapa judul pemberitaan terkait pembangunan bandara NYIA yang cenderung berlebihan dalam memberitakan suatu berita dengan *headline*-nya yang terkadang tidak sesuai dengan isinya. Pemberitaan dalam Tribun Jogja juga terkesan berputar dan cenderung berpihak kepada warga Kulon Progo.

Struktur organisasi Kedaulatan Rakyat merupakan sebuah perusahaan keluarga dimana keluarga Samawi mendapatkan tempat di jajaran kepemimpinan. Hal tersebut tentunya memudahkan untuk mengendalikan berbagai bagian yang berhubungan dengan kebijakan pemberitaan. Dalam pemberitaan seputar pembangunan bandara NYIA, Kedaulatan Rakyat memuat berita tersebut dalam lima pemberitaan. Keseluruhan berita tersebut disajikan pada segmen Kulon Progo. Adanya editorial dalam beberapa berita tersebut menjadi bukti bahwa Kedaulatan Rakyat menganggap bahwa pemberitaan tersebut terbilang penting walau dalam penyajiannya tidak selalu ditempatkan di halaman pertama. Berbeda dari

Tribun Jogja, Kedaulatan Rakyat mengemas kontroversi pembangunan NYIA cenderung mendukung pihak pemerintah dan AP I.

b. Orientasi Penyuplai

Pada orientasi penyuplai ini, konten berita memiliki pengaruh yang penting terhadap orientasi penyuplai. Media massa perlu membangun jaringan yang baik untuk mendapatkan narasumber yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dapat dilihat bahwa disini, Tribun Jogja lebih banyak memuat narasumber yang berasal dari warga penolak bandara di Kulon Progo dan berbagai LSM. Dilihat dari sisi warga Kulon Progo, Tribun Jogja menunjukkan penderitaan yang dirasakan oleh mereka terkait proses pembangunan NYIA ini. LSM atau organisasi masyarakat seperti WTT, PWPP-KP, dan Pantauan Lapangan Aliansi Tolak Bandara juga menyuarakan penolakannya dan mendukung warga terdampak pengosongan lahan di Kulon Progo. hal tersebut dapat dilihat pada empat berita *frame* pertama.

Tribun Jogja juga menyajikan berita dengan *headline* berita yang tidak sekedar mengundang rasa penasaran pembacanya. Tidak seperti yang dilakukan oleh Kedaulatan Rakyat. Pemberitaan pada Kedaulatan Rakyat terkait megaproyek NYIA terkesan lebih tegas dalam pengemasannya. Hal tersebut dilakukan guna meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan NYIA tersebut berdampak positif untuk warga Yogyakarta juga warga

Kulon Progo kedepannya. Meski memiliki idealisme khususnya dalam bidang kemasyarakatan, Kedaulatan Rakyat mau tidak mau akan tetap berkompromi dengan kepentingan perusahaan.